

KLIENTALISME PADA PILKADES TAHUN 2019

(Studi di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)

SKRIPSI

Program Studi (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Selma Vicky Marshananda

2006016096

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Selma Vicky Marshananda

NIM : 2006016096

Jurusa : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Praktik Klientalisme pada PILKADES (Studi Kasus di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang).

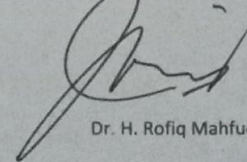
Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada sidang munaqosah/skripsi.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing,



Dr. H. Rofiq Mahfudz M.Si

NIP. 197303052023211007

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI
PRAKTIK KLIENTALISME PADA PILKADES
(Studi Kasus di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)

Disusun Oleh:

Selma Vicky Marshananda

(2006016096)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Desember 2024 dan

Dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris



Nafisah, M.A.
NIP.199511092020122006

Penguji

Pemimbing

Dr. Tholikhahatul Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011000

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si
NIP.197303052023211007

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang sudah pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 9 Desember 2024



Selma Vicky Marshananda

NIM. 2006016096

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah syukurillah penulis panjatkan dengan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam skripsi dengan judul “Klientalisme pada PILKADES Tahun 2019 (Studi di Desa Kadirejo Kecamatan pabelan Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh gelar Sarjana pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islma Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo ini. Penulis juga mengetahui bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna dan muda-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang bersedia membacanya.

Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati dari penulis dengan mendaptkan banyak dukungan, semangat dan serta bantuan dari berbagai pihak baik dengan secara material dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan ijin penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi penulis.
2. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Prof. Dr. H. Imam Yahya M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. M. Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
5. Masrohatun, M.Si selaku Seketariat Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
6. Dr.H. Rofiq Mahfudz M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan saran, dukungan motivasi, kekuatan dan memberikan masukan

untuk penulis. Tak henti-hentinya beliau memberikan nasihat dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat mengerjakan.

7. M. Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Wali Dosen penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi dan masukan selama proses penyusunan skripsi pada penulis.
8. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah medidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengeahuan baru yang mampu membuat penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
9. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisdongo Semarang, yang sudah banyak membantu dalam proses adminitrasi penulisan skripsi.
10. Bapak Riyadi selaku Kepala Desa Kadirejo yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.
11. Ayahanda tercinta Bapak Timbul Wiyono yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa yang tiada hentinyakepada penulis. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Bapak dengan kesehatan, keberkahan di dunia dan juga di akhirat kelak.
12. Ibunda, Ibu Sri Sugiyarti yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya, memberikan selalu semangat, dukungan serta motivasi dan doa yang tiada henti untuk penulis dalam menempuh pendidikan ini. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Ibu dengan kesehatan, keberkahan di dunia dan juga di akhirat kelak.
13. Kakak Laki-laki penulis Alfin Vicky Hidayat yang telah memberikan semanagat, motivasi dan selalu mendengarkan kelus kesah penuli.
14. Kakak Ipar penulis Siti Rohmah Saidah yang telah memberikan semnagat, motivasi dan selalu mendengarkan kelus kesah penuli.
15. Adik penulis Aif Vicky Janatha yang telah memberikan penyemangat dan kebahagiaan setiap hari kepada panulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Pasangan penulis Muhammad Hasyim Asy' Ari yang selalu meluangkan waktu, memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
17. Sahabat penulis Aprilianti dan Nayla Zahra yang selalu memeberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
18. Rekan perkuliahan Latianan Rana Sausan, Alfina Shofiatun Nisa dan Siti Nursaidah, Nur Latifah dan Nafisah Bintang Diyaulhaq yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah penulis dan berjuang bersama dalam menyelesaikan perkulihan hingga di masa perkulihan ini.
19. Teman-teman Ilmu Politik C angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
20. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kebaikan yang telah diberikan akan menjadi berkah untuk kita semua dan dibalas kebaikan kita oleh Allah SWT. Selain itu juga, penulis menyadari bahwa skripsi ini juah dari kata sempurna. Untuk itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Semarang, 9 Desember 2024

Selma Vicky Marshananda

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan segala syukur Allahdulillahirobil'amin, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Pertama, untuk kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai yaitu Bapak Timbul Wiyono dan Ibu Sri Sugiyarti yang telah memberikan cinta, dukungan dan serta doa dalam setiap langkahku dalam mencari ilmu.

Kedua, untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menuntut ilmu.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dai sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yanglain, dan hanya kepada Tuha-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(QS Al Insyirah 6-8)

“You might think that your entire world is falling apart but it’s not”

(Min Yoongi)

“Jangan paksakan dirimu untuk memenuhi standart yang mereka buat, buatlah standartmu sendiri. Karena kita hanya perlu menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri bukan orang lain.”

(BTS)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh respon penulis dalam menanggapi cara para calon kepala desa Kadirejo yang menggunakan praktik klientalisme dalam memperoleh suara. Praktik klientalisme tersebut ternyata sudah mengakar dalam diri dari semua kalangan masyarakat Desa Kadirejo seperti halnya dalam PILKADES 2019. Masyarakat Desa Kadirejo sendiri juga menganggap kalau cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa dianggap normal dan sudah biasa. Anggapan itu didasari juga oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pemahaman terhadap berpolitik masih kurang dan lain-lain. Dengan menggunakan praktik tersebut masyarakat menganggap bahwa kesulitan yang dialami akan terbantu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja bentuk praktik klientalisme yang dilakukan oleh para calon juga untuk mengetahui dampak dari praktik tersebut terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), metodenya dengan kualitatif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis menggunakan teori klientalisme dari Aspinal dan Berenschott untuk memadukan fakta sosial dan fenomena dalam mengkaji praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 Desa Kadirejo.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa praktik klientalisme yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam meraih suara masyarakat terdapat beberapa bentuk praktik yang digunakan seperti uang, mengembangkan permbanganun desa wisata, pengadaan internet desa, peningkatan infrastruktur, pembetulan kelompok usaha bersama dalam mendukung UMKM dan pengembang BUMDes. Sedangkan dampak positif yang dihasilkan dari adanya praktik ini adalah meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemberian akses dan sumber daya serta memperkuat jaringan sosial. Dampak negatifnya adalah dampak merusak sistem demokrasi, penguasaan money politik dan pemicu konflik dalam masyarakat.

Kata Kunci : Klientalisme, PILKADES, Masyarakat

ABSTRACT

This research is motivated by the author's response in responding to the way the candidates for village head of Kadirejo use clientelism practices to gain votes. The clientelism practice has apparently been rooted in all levels of society in Kadirejo Village, as in the 2019 Village Head Election. The people of Kadirejo Village themselves also consider that the methods used by the candidates for village head are considered normal and common. This assumption is also based on several factors such as economic factors, lack of understanding of politics, and others. By using this practice, the community considers that the difficulties experienced will be helped. This research was conducted to find out what forms of clientelism practices are carried out by the candidates and to find out the impact of these practices on the community.

This research uses a type of field research, the method is qualitative, while the research approach used is a case study. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. While the data analysis is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The author uses the clientelism theory from Aspinal and Berenschott to combine social facts and phenomena in examining the practice of clientelism that occurred in the 2019 Village Head Election in Kadirejo Village.

The results of this study indicate that the practice of clientelism carried out by village head candidates in gaining community votes includes several forms of practices used such as money, developing tourism village development, providing village internet, improving infrastructure, forming joint business groups to support MSMEs and developing BUMDes. While the positive impacts resulting from this practice are increasing public political awareness, providing access and resources and strengthening social networks. The negative impacts are the impact of damaging the democratic system, control of money politics and triggering conflict in society.

Keywords: Clientelism, Village Head Election, Society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGATAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjaua Pustaka	5
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PRAKTIK KLIENTALISME MENURUT PERSPREKTIF TEORI ASPINAL DAN BERENSCHOTT	21
A. Definisi Konseptual	21
1. Klientalisme	21
2. PILKADES	23
B. Teori Klientalisme	25

BAB III PROFIL DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG	28
A. Kondisi geografis dan topografis desa kadirejo	28
B. Kondisi demografis desa kadirejo	29
1. Jumlah Penduduk Desa Kadirejo	29
2. Penduduk Menurut Umur	30
3. Latar Belakang Pendidikan	33
4. Latar Belakang Menurut Mata Pencarian	33
C. Profil Desa Kadirejo	36
1. Sejarah Desa Kadirejo	35
2. Visi dan Misi	36
 BAB IV BENTUK PRAKTIK KLIENTALISME YANG TERJADI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI DESA KADIREJO	39
A. Uang	39
B. Pembangunan Pengembangan Desa Wisata Desa Kadirejo ‘Agro Park dan Research Center bidang Pertanian dan Pertenakan	43
C. Pengadaan internet Desa hasil kerjasama dengan Surya Nett	45
D. Peningkatan Infrastruktur Desa	47
E. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama dalam rangka mendukung kegiatan UMKM di Desa	50
F. Pengembangan BUMDes Jaya Mandiri	53
 BAB V DAMPAK PRAKTIK KLIENTALISME PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI DESA KADIREJO	56
A. Dampak Positif	56
1. Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Sumber Daya Manusia	56
2. Pemberian Akses dan Bantuan terhadap Sumber Daya Manusia	58
3. Memperkuat Jaringan Sosial dan Dukungan	60
B. Dampak Negatif	63
1. Merusak Sistem Demokrasi	63
2. Penguasaan Money Politik	63
3. Pemicu Konflik dalam Masyarakat	64
 BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Desa Kadirejo	29
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Umur	31
Tabel 4. Penduduk Menurut Pendidikan	32
Tabel 5. Penduduk Menurut Perkerjaan.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Kadirejo	28
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat perkembangan demokrasi pasca berakhirnya Perang Dingin, klientelisme merupakan masalah yang terus memburuk dalam perdebatan politik. Dapat dikatakan bahwa lembaga politik yang sedang mengalami transisi demokrasi adalah lembaga yang paling rentan terhadap hubungan patron-klien. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktural yang sedang berlangsung dan kemungkinan distorsi dalam perubahan tersebut. Tren ini lebih terkait langsung dengan kompetensi kekuasaan Indonesia antara distorsi oligarki dan proses demokratisasi. Klientelisme mengacu pada penggunaan masyarakat sebagai alat oleh kandidat untuk memenangkan suara. Selain kemampuannya untuk memengaruhi masyarakat yang lebih luas dengan memberlakukan kebijakan yang menguntungkannya, pembela juga akan memanfaatkan posisinya saat ini untuk mengumpulkan suara dari pegawai negeri atau karyawan dengan menawarkan mereka posisi baru atau fasilitas pendukung lainnya. Ini adalah contoh karakteristik hubungan patron-klien. Misalnya, seorang kandidat dengan riwayat menjabat akan mendapatkan dukungan dari hubungan dengan pemimpin lain, anggota staf, atau pemimpin masyarakat selain dari tokoh politik yang lebih cenderung menggambarkan diri mereka sebagai orang yang layak menduduki posisi kepemimpinan (Ardi, 2022).

Di Indonesia, pemilihan umum tidak diragukan lagi digunakan untuk memilih pemimpin di semua tingkat pemerintahan, terutama di daerah pedesaan. Kontes pemilihan kepala desa atau Pilkades sering dianggap dinamis karena munculnya beberapa isu dan kejadian. Ketika terjadi kontestasi, tidak diragukan lagi ada perebutan kekuasaan di antara para peserta, dan mereka akan melakukan berbagai tindakan untuk menang. Mengingat banyaknya hak istimewa yang menyertai jabatan tersebut, pemilihan kepala desa saat ini sedang diperebutkan.

Setiap kandidat bebas menggunakan dukungan politik masyarakat atau mematuhi aturan dan undang-undang serta tidak merugikan pihak lain untuk mendapatkan legitimasi dalam pertarungan politik pemilihan. Taktik politik yang paling umum dalam kontestasi politik adalah politik klientelisme. Politik yang berdasarkan klientelisme dapat beroperasi dalam skala besar dengan sumber daya yang banyak, selain pemilihan umum skala kecil. Politikus berupaya membeli dukungan masyarakat dengan taktik ini, pembagian manfaat dalam bentuk amplop berisi uang tunai, pembagian sembako, dan bentuk bantuan lainnya (Singgalinggi, 2022). Pada Pemilihan Kepala Desa 2019, Desa Kadirejo juga terlibat dalam praktik klientelisme.

Kadirejo merupakan sebuah desa di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Desa Kadirejo terdiri dari 8 dusun dan 24 RT. Perekonomian pada Desa Kadirejo sendiri didapatkan melalui perdagangan seperti sayur mayur, beras, pakan ternak, hewan ternak dan juga berbagai olahan makanan yang dibuat oleh masyarakat Desa. Desa Kadirejo diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung desa-desa di Kecamatan Bringin dan Bancak menuju Kota Salatiga. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan desa. Jumlah KK yang ada di Desa Kadirejo keseluruhan sebanyak 1.058, dengan rinciannya adalah jumlah penduduk sebanyak 3.233 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.581 dan penduduk perempuan sebanyak 1.652 jiwa.

Dalam pemilihan Kepala Desa terdapat tiga kandidat calon yaitu Bapak Marjo, Bapak Riyadi dan Bapak Samsudin. Dari ketiga kandidat tersebut poling suara tersebut dimenangkan oleh Bapak Riyadi. Calon atas nama Bapak Riyadi No. Urut 2 memperoleh suara sebanyak 857 suara. Dengan di setiap dusun jumlah pemilihnya adalah Dapil Dusun Gelangan dengan jumlah pemilih 202 orang, Dapil Dusun Gayam jumlah pemilih 513 orang, Dapil Dusun Dampyak jumlah pemilih 147 orang, Dapil Dusun Demangan jumlah pemilih 250 orang, Dapil Dusun Bungas jumlah pemilih 289 orang, Dapil Dusun Wonolelo jumlah pemilih 380

orang, Dapil Dusun Daleman jumlah pemilih 148 orang dan Dapil Dusun Ngablak jumlah pemilih 309 orang. Dalam klientalisme politik terjadi para pemilih atau para aktivitas yang sudah memberikan dukungan elektoral kepada tokoh politik dengan imbalan barang atau jasa atau bisa juga berupa cabatan dan proyek yang diberikannya. Yang dimaksud dalam diberikan jabatan adalah diantara menjadi sekretaris atau bisa juga yang bekerja di balai desa yang berada di dusun Bungas, atau dengan diberikan proyek besar yang dimaksud itu sebagai contohnya calon kepala desa menjanjikan kepada masyarakat setempat untuk membenarkan jalan atau mengaspal jalan yang sudah rusak maka tim yang menjadi tim sukses calon kepala desa tersebut akan diberikan tugas untuk mengatur proyek besar mengaspal jalan yang sudah rusak di Dusun Bungas tersebut.

Jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh calon kepala desa atas nama Bapak Riyadi pada Pilkades 2019 diterima begitu saja oleh masyarakat, dan karena dianggap biasa saja, maka dianggap juga sebagai hal yang lumrah dalam benak masyarakat. Faktor ketidaktahuan ini semakin diperkuat oleh anggapan masyarakat setempat bahwa yang lebih banyak memberikan kontribusinya dalam pemilu akan menang dan harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat jika ingin terpilih menjadi kepala desa. Hal ini semakin diperkuat dengan diterimanya barang dan jasa tersebut oleh masyarakat. Menurut sebagian dari mereka, musim pemilihan merupakan ajang tersendiri untuk mendongkrak pendapatan, termasuk dana untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya, para calon di Desa Kadirejo akan menyumbangkan sejumlah uang atau barang seperti material dan non-material untuk meraih suara. Calon Kepala Desa Bapak Riyad saat itu menyasar sebuah organisasi, seperti kelompok Karang Taruna di Dusun Bungas, selain merujuk ke masyarakat di Desa Kadirejo itu sendiri. Agar mendapatkan fasilitas yang diinginkan, Calon Kepala Desa Bapak Riyadi meminta Karang Taruna untuk memilih Kepala Desa dengan dijanjikan sebuah lapangan olahraga atau akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh Bapak Riyadi saat PILKADES 2019.

Sehingga dalam riset ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik Klientalisme ini terjadi pada pilkades 2019 dan dampak apasaja yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik ini. Selain itu penulis ingin mengetahui bentuk barang atau jasa yang di berikan pencalon kepada masyarakat untuk menarik suaranya. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "KLIENTALISME PADA PILKADES TAHUN 2019 (Studi Di Dusun Bungas Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk praktik klientalisme yang berlangsung pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Kadirejo?
2. Bagaimana dampak praktik klientalisme yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Kadirejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk praktik klientalisme yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2019 terjadi di Desa Kadirejo.
2. Untuk mengetahui dampak pada praktik klientalisme yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2019 terjadi di Desa Kadirejo.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh klientalisme dalam wacana politik.
2. Dalam penelitian ini semoga mampu memberikan pengertian akan demokrasi dan politik lokan di Dusun Bungas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur yang peneliti gunakan, peneliti membagi tinjauan Pustaka menjadi 2, yaitu klientalisme dan patronase.

1. Klientalisme

Kajian tentang Klientalisme, peneliti mengambil data penelitian dari Lesmana (2019), Assidiqi (2022), Sudarmono (2020), Misra (2021) dan Geraldly (2024).

Penelitian yang di lakukan oleh Lesmana (2019) meneliti tentang bahayanya praktik klientalisme dalam pilkades serentak. Dimana pada pilkades serentak dapat di buktikan bahwa pembelian

suara, klientelisme, dan patronase merupakan beberapa taktik yang efektif untuk membangkitkan semangat orang-orang dengan harapan menang. Teknik strategi kemenangan didasarkan pada kebiasaan yang ditanamkan oleh pemilihan umum berskala besar di masyarakat. Selanjutnya, Assidiqi (2022) juga membahas topik tentang pandangan Moh. Hatta dalam mengkritik praktik Klientalisme di Indonesia. Dimana dikatakan bahwa klientelisme adalah strategi yang disukai elit politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dalam masyarakat yang demokratis. Kritik Hatta terhadap klientelisme Indonesia, baik secara terang-terangan maupun terselubung, berasal dari standarnya yang tinggi terhadap literasi politik rakyat dan fungsi partai politik dalam mendidik rakyat. Lalu Sudarmono (2020) membahas tentang kasus klientalisme di pesisir Kota Makassar mengatakan bahwa dalam masyarakat nelayan Kota Makassar, hubungan patron-klien telah terjalin selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad, sebelum masa sekarang. Hubungan patron-klien telah berkembang seiring dengan perkembangan desa nelayan, menjadi bagian dari perubahan sosial ekonomi mereka. Terdapat juga penelitian dari Misra (2021) yang membahas tentang praktik klientalisme dan politik uang yang terjadi dalam Pilkada Riau. Dalam penelitiannya terdapat hasil yang menunjukkan bahwa unsur-unsur sosial budaya signifikan dalam pemilihan kepala daerah di Riau. Menemukan bahwa tiga jenis ikatan klientalistik yang berbeda terbentuk: kemitraan berbasis broker, berbasis layanan konstitusional, dan berbasis etnis sementara juga menunjukkan tanda-tanda politik uang. Kehadiran Gus Mudhlor, putra Kyai Gus Ali yang agung dan berkharisma, dalam kontestasi linier dengan basis sosial budaya masyarakat Sidoarjo sebagai masyarakat beragama merupakan faktor awal

terbentuknya politik patron-klien, menurut Geraldly (2024) yang juga membahas fenomena klientalisme terkait kekuasaan patron-klien Gus Ali dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor-Subandi. Hal ini dilembagakan dengan kemenangan bertubi-tubi PKB dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada di Sidoarjo sejak beberapa tahun lalu. Masyarakat dan beberapa Lembaga pemerintahan kemudian menaruh prefrensi politik terhadap Gus Mudhlor karena factor ketokohan Gus Ali. Kedua, pola yang kemudian terbentuk adalah melalui penguatan relasi patron-klien Kyai dan Santri, serta kampanye yang bermuatan simbolisasi agama. Pasca Pilkada, relasi yang kemudian terbentuk adalah mekanisme partisipasi politik Masyarakat terhadap Gus Ali, sebagai tokoh agama yang memiliki legitimasi politik untuk mengintervensi kebijakan pemerintahan Gus Madhlor. Selain itu, Gus Madhlor menggunakan pengaruh ketokohan Gus Ali untuk menjalankan roda kebijakan politik.

2. Pilkades

Kajian mengenai pemilu telah di bahas oleh beberapa peneliti, dalam pilkades peneliti menganbil penelitian dari Hidayat (2023), Sofyan (2021), Firmansyah (2018), Pratiwi (2020) dan Ardiansyah (2018).

Penelitian yang di lakukan oleh Hidayat (2023) membahas tentang strategi komunikasi menjamin keamanan kontestasi politik tingkat desa. Dalam rangka pengamanan pilkada desa, kajian ini mengidentifikasi dua bentuk taktik komunikasi militer. Pertama, metode komunikasi sosial yang dapat dilakukan secara terbuka, tertutup, dan klandestin. Kedua, rencana komunikasi media, yang meliputi media sosial dan media massa. Melalui akun Instagram resmi Kodim Ciamis, kajian kami juga menemukan strategi

komunikasi. Dalam rangka pengamanan pilkada desa, berbagai taktik dan pesan komunikasi diciptakan dan berhasil. Terbukti dengan rendahnya tingkat keresahan sosial akibat perbedaan pendapat atas hasil pilkada desa, pelaksanaan demokrasi desa berjalan dengan baik. Kedua, media massa dan media sosial juga dimanfaatkan oleh pelaku aparat keamanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjamin keamanan pilkada desa. Selanjutnya, Sofyan (2021) dalam penelitiannya membahas tentang Selama ini pernyataan masyarakat tentang tujuan Pemilihan Kepala Desa sudah cukup baik. disampaikan secara bebas dan terbuka di muka umum. Melalui kampanye dialogis dan tim sukses masing-masing calon, masyarakat dapat mengkomunikasikan tujuan kepada Calon Kepala Desa. Rumusan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 31–32 dimaksud dalam uraian program kerja, visi, dan misi calon kepala desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media, mulai dari masa prakampanye, masa kampanye, hingga masa tenang Pemilihan Kepala Desa. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, visi, misi, dan program kerja calon kepala desa dikaji secara tertulis, lisan, melalui media, pada papan reklame, atau secara langsung di kantor panitia pemilihan kepala desa. Lalu, Firmansyah (2018) membahas mengenai Pembentukan tim panitia tingkat distrik oleh Bupati untuk mendukung panitia desa yang dibentuk oleh BPD Desa Ujunggede akan memungkinkan terlaksananya kebijakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa tahun 2016 dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2015. Menurut teori George C. Edwards III (1980), kendala pelaksanaan kebijakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa tahun 2016 di Kabupaten

Pemalang adalah sebagai berikut: Terkait dengan komunikasi, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai penentu kebijakan agar memberikan sosialisasi dan simulasi kepada warga Ujungede. Warga dan panitia pemilihan kepala desa menyampaikan ketidakpuasan atas minimnya sumber daya alat E-Voting tersebut, dengan alasan banyaknya kekurangan alat pembaca E-KTP dan masih rendahnya rasio pemilih terhadap bilik suara di setiap dusun. SKPD yang bertugas mengelola data E-KTP telah mendatangi Desa Ujungede, namun hanya untuk melakukan pemantauan dan perekaman E-KTP warga yang sudah dibuat dan yang belum. Hal ini menjadi tantangan dalam hal penanganan, khususnya kebutuhan perekaman E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kantor Kecamatan Ampelgading, Disdukcatpil. Selain itu, Pratiwi (2020) dalam kajiannya membahas tentang Teori penerapan strategi pemasaran politik 4P yang disajikan dalam buku Firmanzah digunakan untuk menganalisis strategi politik Sutrisno sebagai kepala desa petahana dalam pemilihan kepala desa Sidomukti. Diungkapkan bahwa produk Sutrisno adalah membuat visi, misi, dan program kerja yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa. Agar mudah diingat oleh masyarakat, Sutrisno terus-menerus melakukan kampanye melalui interaksi dalam suasana formal dan informal. Kampanye ini bersifat terus-menerus dan tidak hanya berlangsung sepanjang musim kampanye. Karena suara publik terhadap Sutrisno dipengaruhi oleh rekam jejak dan reputasinya yang baik, harga yang ia jual adalah hasil kerja nyata atau keberhasilannya melaksanakan rencana kerja selama dua periode sebelumnya. Terakhir, Ardiansyah (2018) memeliti tentang kemampuan berkomunikasi dalam pilkades di desa Pamboborang. Hasil analisis dalam pembahasan ini menghasilkan

beberapa simpulan, antara lain bahwa para calon kepala desa di Desa Pamboborang, Desa Limbua, dan Desa Lalateong hampir sama-sama piawai dalam menjalin komunikasi sosial dengan warga masyarakat peserta Pilkades untuk membangun jati diri, untuk bertahan hidup, dan untuk mengaktualisasikan diri, termasuk melalui komunikasi yang menghibur dan membina hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang bersifat persuasif digunakan dalam upaya untuk menarik hati warga masyarakat. Dengan menonjolkan ciri pembicara dan pendengar, maka persuasif merupakan upaya untuk mengubah sikap melalui penggunaan komunikasi. Selain itu, ketiga calon kepala desa tersebut menggunakan metode komunikasi sosial yang hampir sama, yaitu komunikasi antarpribadi, untuk memobilisasi masyarakat agar mendukung pilihan mereka terhadap calon peserta Pilkades. Janji-janji calon kepala desa yang dituangkan dalam visi dan misi yang diucapkan pada saat pencalonan, kearifan lokal calon kepala desa, dan unsur-unsur lainnya merupakan faktor pendorong masyarakat untuk memilih kepala desa. Keluarga: melalui jaringan kekeluargaan dan persaudaraan yang mendukung pencalonan kepala desa; finansial: dukungan yang diberikan pada saat pencalonan. Menarik untuk mengkaji setiap aspek komunikasi sosial dalam pemilihan kepala desa. Penulis berpendapat akan lebih lengkap jika dikaji lebih khusus pada pesan, media atau dampak komunikasi.

F. Kerangka Teori

A. Definisi Konseptual

1. Klientalisme

Istilah "klientelisme" sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu selain patronase. Patronase adalah hubungan dua arah di mana seseorang dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) memanfaatkan sumber daya dan pengaruhnya untuk melindungi klien dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien), yang kemudian mendukung dan membantu patron tersebut.

Dinamika kekuasaan yang bersifat pribadi, timbal balik, hierarkis, dan berulang antara patron dan klien dikenal sebagai klientelisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klientelisme mengacu pada ikatan atau jaringan. Patron memiliki kendali penuh atas jaringan, yang mengakibatkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Patron mengendalikan studi untuk menjadi perantara bagi kliennya (Ardi, 2022).

2. Pilkades

Struktur pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan nasional. Kepala desa dipilih langsung oleh warga setempat. Warga biasa dapat menduduki jabatan Kepala Desa, berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Ipil. Bupati atau Walikota menunjuk Kepala Desa, yang tugas utamanya adalah mengawasi pemerintahan desa (Diky, 2021). Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengendalikannya bertugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, pemerataan, dan keadilan serta ciri khas dan kekhususan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memberikan hak pilih secara penuh, Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu komponen keterlibatan masyarakat dalam memajukan desa (Diky, 2021). Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang melekat pada diri mereka untuk memilih, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi mereka yang telah menggunakan hak tersebut. Semua komponen penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk diputuskan sesuai dengan asas kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi apabila pemerintah tidak menjamin pemilihan Kepala Desa oleh pemilih, menunda pemilihan Kepala Desa tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak mengambil tindakan apa pun untuk memastikan pemilihan Kepala Desa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

B. Landasan Teori

Dalam studi penelitian ini, penulis menggunakan teori Klientalisme yang dikembangkan oleh Aspinal dan Berenschot dalam kerangka pikir menjawab pertanyaan mengenai Klientalisme pada Pilkades.

Dalam politik, klientelisme adalah praktik tokoh atau partai politik yang memberikan bantuan materi atau lainnya kepada orang atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan mereka. Bantuan dapat berupa uang tunai, pekerjaan, penasihat hukum, atau layanan lainnya. Karena klientelisme merusak proses demokrasi dan melanggar gagasan tentang keadilan, maka klientelisme sering dianggap sebagai jenis korupsi politik. Ada tiga tahap dalam studi klientelisme. Pada tahap pertama, sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, ada sekelompok pelopor intelektual yang sebagian besar bekerja sebagai antropolog di Asia Tenggara dan sebagian besar adalah petani. Komunitas ini mulai merambah ranah politik setelah mengamati dinamika patron-klien yang terjadi antara pemilik tanah dan buruh tani yang menggarap lahannya. Ketika

buruh tani pertama kali mengandalkan bantuan pemilik tanah, tuan tanah sering kali memanfaatkan mereka.

Tahun 1980-an dan paruh pertama tahun 1990-an menyaksikan perkembangan fase klientelisme kedua. Klientelisme sebagai taktik mobilisasi politik yang menggabungkan jaringan klientelisme yang terdiri dari banyak segmen, kelompok, dan partai politik menjadi topik utama pembahasan selama kurun waktu ini.

Klientelisme dengan definisi secara umum terdapat 2 baik definisi makro maupun mikro, yaitu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gagasan klientelisme makro Menurut Lemarchand dan Legg (1972) , klientelisme adalah hubungan di mana satu atau lebih pelaku mengendalikan sumber daya yang tidak setara melalui interaksi yang saling menguntungkan, personal, emosional, dan timbal balik. Menurut Briquet (2007), klientelisme adalah pertukaran barang dan jasa yang bersifat timbal balik berdasarkan jaringan personal antara orang-orang yang kedudukannya tidak setara yang menurut kedua belah pihak diperlukan secara moral (Mulayadi, 2018).

Meskipun klientelisme didefinisikan sebagai mikro, definisi mikro lebih menekankan pada pertukaran produk atau layanan sosial untuk mendapatkan dukungan politik. Menurut Piattoni (2001), klientelisme termasuk dalam kategori mikro dan merupakan pertukaran suara atau jenis dukungan lain untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan (Mulayadi, 2018).

Dengan demikian, hubungan antara buruh tani dan bangsawan digunakan untuk menggambarkan klientelisme yang mulai muncul antara kandidat politik dan pemilih untuk memberikan timbal balik. Akibatnya, hal ini terjadi dalam pemilu Indonesia, di mana masyarakat telah mengandalkan bentuk administrasi personalistik sejak era kerajaan (Nordholt, 2015). Menurut para ilmuwan, klientelisme merupakan jenis interaksi sosial yang unik dalam dan dari dirinya sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Lemarchand dan Legg (1972) di buku *Demokrasi For Sale*, klientelisme politik, misalnya, merupakan bentuk

interaksi yang pada dasarnya antara klien dan aktor yang selanjutnya akan menganut gagasan keuntungan timbal balik. Namun, ada tiga gelombang klientelisme secara umum yang di kemukakan oleh Aspinal dan Berenschot di buku *Democrasi For Sale: institusionalis, marketis, dan kulturalis* .

Gelombang pertama institusionalisme menciptakan lembaga negara, menawarkan validasi, dan bahkan diprediksi mampu menghentikan politisi yang berusaha mendorong kebijakan klientalis. Pada akhirnya, negara akan mampu melepaskan diri dari kebijakan klientalis, atau bahkan sebaliknya, menjebak 13 orang dalam kebijakan klientalis yang semakin ketat (Kenny, 2015). Ketika pemerintah atau birokrasi memiliki cukup waktu untuk berkembang menjadi entitas yang kuat dan independen, hal ini dapat mengurangi klientalis politik. Namun, pada lembaga yang lebih lemah, perilaku klientalis juga dapat ditemukan di lembaga pemerintah. Misalnya, dalam masalah anggaran, proses klientalis bahkan melibatkan pembelian dan penjualan jabatan.

Gelombang kedua bersifat marketis, ketika politisi menyoroti kelebihan dan kekurangan pertukaran dengan menghitung biaya dan manfaatnya. Konsep ini berimplikasi pada rasionalitas tindakan politik, karena pemilih menggunakan surat suara mereka untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi mereka jika terjadi kemenangan pemilihan umum, sementara politisi memanfaatkan pengaruh maksimal mereka untuk memengaruhi suara pemilih selama pemilihan (Kramon, 2016). Adanya klien pasar dapat mengurangi praktik klien secara tidak langsung melalui pengaruh politik dan pasar.

Hubungan patron-klien dibentuk oleh norma dan cita-cita masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh gelombang ketiga kulturalisme. Dengan menggunakan metode ini, para ilmuwan sering mencatat bagaimana elit politik diharapkan untuk membalas, dengan dukungan dari kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat (Scott, 1972). Menurut Lawson (2014), hal ini mengarah pada fokus pada budaya itu sendiri, yang akhirnya berkembang

menjadi perilaku timbal balik yang menjadi adat istiadat. Dalam masyarakat, nilai-nilai budaya dan tradisional sering dikaitkan dengan fenomena klientelisme budaya. Tradisi patron-klien adalah tradisi di mana kesetiaan dan timbal balik membentuk dasar hubungan antara patron dan klien, untuk memperkuat ikatan budaya antara patron dan klien melalui simbolisme klientelisme itu sendiri. Penyaluran bantuan sosial atau perencanaan proyek pembangunan adalah dua contoh bagaimana praktik-praktik ini sering kali mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat. Contoh-contoh lain termasuk ritual keagamaan yang menjunjung tinggi hubungan dan memvalidasi patron, simbol kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap kebijakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari metodologinya dan menggabungkan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan kualitatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang narasi yang diperoleh dari pengamat, narasumber, dan penggalian dokumen. Ketika ditafsirkan secara mendalam dan tepat, metodologi penelitian kualitatif dapat menciptakan ruang yang cukup untuk wacana ilmiah dalam berbagai situasi.

2. Sumber dan Jenis Data

Subjek yang menjadi sumber pengumpulan data atau apa pun yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dianggap sebagai sumber data. Suhatsimi (2006). Data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah wawancara dan observasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian di Dusun Bungas. Penelitian ini melakukan wawancara dan observasi langsung yang dapat diperoleh dari narasumber.

Peneliti mempersiapkan wawancara dan menggunakannya untuk mewawancarai narasumber yang telah dipilih sebelumnya mengenai Praktik Klientalisme yang terjadi dalam PILKADES 2019 di Dusun Bungas melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan. Berdasarkan faktor-faktor yang sejalan dengan penelitian ini, sumber-sumber peneliti juga ditetapkan.

b. Data Sekunder

Sumber dokumentasi yang dapat merujuk pada data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya adalah sumber data sekunder yang dibahas di sini. Selain sumber yang sudah ada sebelumnya,

penyelidik juga mengumpulkan informasi pendukung, seperti buku dan bacaan, yang mungkin sesuai dengan topik klientelisme yang sedang diselidiki. Sumber data berasal dari artikel yang ditemukan melalui media lokal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Proses pemantauan dan pendokumentasian yang terorganisasi terhadap sesuatu yang diteliti disebut observasi. Karena memerlukan keakuratan dan ketepatan dalam praktiknya, observasi yang dilakukan penulis dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Banyak instrumen yang diperlukan untuk observasi, termasuk tape recorder, kamera, buku catatan elektronik, dan alat-alat lain berdasarkan kebutuhan observasi.

Dengan menggunakan metode observasi partisipasi overt, peneliti dalam penelitian ini berpartisipasi/bergabung ke dalam kegiatan sehari-hari subjek atau menggunakan subjek sebagai sumber data.

b. Wawancara

Obrolan dengan seseorang dalam rapat yang mencakup pertanyaan dan jawaban disebut wawancara. Wawancara diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat formalitasnya: tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur.

Wawancara bebas yang dilakukan tanpa mengikuti strategi wawancara yang telah direncanakan dan diatur secara metodelis dikenal sebagai wawancara tidak terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur, yang sering kali membutuhkan waktu lebih sedikit karena serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya telah disajikan dan diatur dengan cukup baik. Di sisi lain, wawancara semi-terstruktur adalah wawancara di mana topik atau isu menentukan alur diskusi dan tidak mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini

adalah wawancara yang paling umum digunakan karena lebih terarah, tidak terlalu fleksibel atau tidak fleksibel, dan sangat produktif dalam hal menghemat waktu dan mengumpulkan data.

Teknik purposive digunakan dalam pemilihan informan penelitian ini. Menurut Maxwell (2012), purposive sampling adalah suatu teknik di mana individu atau partisipan studi tertentu dipilih secara cermat untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh melalui cara lain. (Firmansyah, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena untuk memudahkan peneliti dan wawancara untuk mengetahui Praktik Klientalisme dan Patronase pada Pilkades tahun 2019 di Dusun Bungas dengan dimana peneliti akan mewawancarai Perangkat Desa, Masyarakat dan Pemuda di Dusun Bungas.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dari dokumen disebut dengan dokumentasi, seperti buku, catatan, buku harian, terbitan berkala, surat kabar, arsip, korespondensi, laporan penelitian, dan sebagainya.

Dokumentasi diartikan juga sebagai arsip kejadian historis. Dokumen dapat berupa tulisan atau visual, tetapi dapat juga berupa karya observasi dan teknik wawancara berskala besar yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

d. Teknis Analisis Data

Metode data mengacu pada pencarian dan pengorganisasian sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, dan jenis catatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyampaikan temuannya kepada publik.

Teknik analisis data adalah cara mengubah data menjadi informasi sehingga sifat-sifat data dapat dengan mudah diidentifikasi dan digunakan

untuk mengidentifikasi masalah dan kemungkinan jawaban atas suatu penelitian.

Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik Miles & Huberman. Teknis analisis terdiri dari tiga tahapan meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Proses pemilihan atau pemadatan informasi penting dikenal sebagai reduksi data. Sebagian besar pengumpulan data lapangan memerlukan dokumentasi yang sangat teliti.

2. Penyajian Data

Setelah produser meminimalkan data, penelitian berlanjut ke penyajian data. Kumpulan informasi terstruktur disebut penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Membuat kesimpulan merupakan cara untuk memahami implikasi yang ditemukan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka.

BAB II Praktik Klientalisme Menurut Perspektif Teori Aspinal dan Berenschot

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang praktik klientalisme yang terjadi di Desa Kadirejo Kabupaten Semarang menggunakan teori Aspinal dan Berenschot.

BAB III Profil Desa Kadirejo

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan profil Desa Kadirejo sebagai objek dalam penelitian ini.

BAB IV Bentuk Praktik Klientalisme yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Kadirejo

Pada bab ini peneliti akan menguraikan bentuk proses klientalisme yang terjadi di Desa Kadirejo, seperti bentuk barang atau jasa yang di janjikan pencalon/kandidat.

BAB V Dampak Praktik Klientalisme terjadi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Kadirejo

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dampak dari praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES 2019 di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

BAB VI Penutup

Pada bab ini penelitian akan memberikan saran dan juga kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

PRAKTIK KLIENTALISME MENURUT PERSPEKTIF TEORI ASPINAL DAN BERENSCHOT

A. Definisi Konseptual

1. Klientalisme

Seringkali, kata "klienisme" digunakan untuk menggambarkan sesuatu selain patronase. Patronase adalah hubungan dua arah di mana individu yang lebih kaya (patron) menggunakan uang dan kekuasaannya untuk melindungi individu yang lebih miskin (klien), yang kemudian membantu dan mendukung patron tersebut.

Dinamika kekuasaan yang bersifat personal, resiprokal, hierarkis, dan literatif antara patron dan klien dikenal dengan istilah klientelisme. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa klientelisme membahas tentang ikatan atau jaringan. Patron memiliki kendali penuh atas jaringan tersebut, yang mengakibatkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Menurut penelitian, patron memiliki kewenangan untuk turun tangan dan membantu kliennya (Ardi, 2022).

Istilah "klientelisme" menggambarkan sifat individual dari dinamika kekuasaan dan pertukaran keuntungan finansial untuk dukungan politik. Menurut Hopkins, klientelisme adalah jenis perdagangan pribadi yang biasanya ditandai oleh tugas dan bahkan dinamika kekuasaan yang tidak setara antara para pihak. Menurut Scott, hubungan patron-klien merupakan contoh unik dari hubungan dua orang yang pada dasarnya merupakan persahabatan instrumental di mana klien dengan peringkat lebih rendah menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk menawarkan perlindungan, manfaat, atau keduanya kepada klien dengan peringkat lebih tinggi. Klien dengan peringkat lebih rendah kemudian membalas patron dengan menyediakan layanan pribadi, dukungan umum, dan bantuan.

Saat ini, klientelisme politik sebagian besar dipahami sebagai perilaku politik yang dapat dijelaskan oleh pilihan aktor tertentu. Ciri budaya lain dari beberapa negara yang relevan dengan bentuk demokrasi atau keluarga tertentu adalah klientelisme. Klientelisme politik jarang menguntungkan, meskipun faktanya sering digambarkan sebagai hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini karena pemilih dipengaruhi oleh sejumlah hal saat memberikan suara mereka. Tersebarinya jaringan pribadi yang tidak loyal dapat menjadi indikator negatif dari variabel-variabel ini. Klientelisme didorong dan dipertahankan oleh sejauh mana elemen-elemen ini dapat merusak jalannya demokrasi "normal" atau politik demokratis secara umum.

Menurut Tomsa dan Ufen (2012), klientelisme merupakan jaringan hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup aspek resiprositas, ketimpangan status, dan iterasi. Selain itu, klientelisme mengacu pada dinamika kekuasaan yang bersifat resiprokal, iteratif, hierarkis, dan personal antara patron dan klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klientelisme membahas tentang ikatan atau jaringan. Patron memiliki kendali penuh atas jaringan tersebut, yang mengakibatkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Klientelisme didefinisikan dalam studi politik sebagai jaringan yang dikendalikan oleh patron untuk memengaruhi klien mereka (Aspinall, 2015). Menurut pakar ini, klientelisme terdiri dari sejumlah komponen penting. Iterasi, asimetri, dan resiprositas adalah tiga komponen klientelisme (Tomsa & Ufen, 2012). Cendekiawan lain juga mengklaim bahwa empat elemen klientelisme adalah hierarki, iterasi, resiprositas, dan personalisme (Aspinall, 2015). Meskipun demikian, dapat disimpulkan dari kedua pakar ini bahwa klientelisme memiliki empat karakteristik pembeda: iterasi, asimetri, resiprositas, dan personalisme.

2. Pilkades

Pembahasan tentang pemilihan kepala desa atau PILKADES mengandung makna bahwa tujuan pemilihan adalah untuk memilih calon yang paling berkualitas dan mampu mengarahkan pembangunan desa, dengan syarat calon tersebut terpilih dan mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, transparansi, kebebasan, dan kerahasiaan sebagaimana yang ditetapkan oleh masyarakat setempat. Salah satu peristiwa politik yang paling menarik bagi masyarakat pedesaan adalah pemilihan kepala desa, dan situasi saat ini penuh dengan komedi. Struktur pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan nasional. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga setempat. Warga biasa dapat menduduki jabatan kepala desa, berbeda halnya dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil. Kepala Desa ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang tugasnya hanya mengawasi tata kelola pemerintahan desa (Diky, 2021).

Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan tindakan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bertugas untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan menitikberatkan pada nilai-nilai demokrasi, pemerataan, dan keadilan serta ciri khas masing-masing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah juga berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah.

Pemilihan kepala desa sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk di tingkat lokal karena menentukan penempatan penting warga negara dan pilihan pemimpin yang akan mengambil alih jika terjadi perang. Salah satu instrumen pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah pemilihan Kepala Desa yang memiliki hak suara penuh (Diky, 2021). Cara lain perwujudan demokrasi desa adalah melalui pemilihan kepala desa yang menentukan mutu kepemimpinan daerah. Berbeda dengan kepala desa sipil yang dapat dicalonkan oleh penduduk biasa, kepala desa dipilih langsung oleh

penduduk setempat. Pemilihan kepala desa, atau pilkades, adalah sebutan untuk prosedur ini. Hak dasar untuk memilih dijamin oleh undang-undang bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajibannya.

Menurut paham kedaulatan rakyat yang beranggapan bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka segala aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk pengambilan keputusan. Jika pemerintah tidak menjamin bahwa pemilih akan memilih kepala desa, menunda pemilu tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak mengambil langkah apa pun untuk memastikan bahwa pemilu tidak dilaksanakan dengan benar, maka hak asasi manusia telah dilanggar.

Demokrasi langsung dipraktikkan di daerah pedesaan melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Proses pemilihan diutamakan dalam demokrasi langsung jenis ini dengan memberikan bobot yang sama kepada tiga komponen penting: daya saing pesaing, partisipasi, dan kebebasan (liberalisasi). Calon kepala desa dan proses pemilihannya menjadi subjek persaingan ini. Cara masyarakat memandang pemilihan kepala desa, bagaimana mereka memilih jenis kepemimpinan kepala desa, dan bagaimana mereka merundingkan kesepakatan politik dengan calon kepala desa merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi partisipasi. Komponen kebebasan berdampak langsung pada sentimen pemilih ketika memilih calon untuk jabatan kepala desa (Karisma, 2024).

Agar berhasil, para kandidat kepala desa harus memiliki rencana yang matang, seperti menggunakan hubungan kekerabatan untuk membentuk koalisi yang unggul. Hubungan kekerabatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan para kandidat kepala desa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan pejabat atau yang sedang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu.

B. Teori Klientalisme

Dalam studi penelitian ini, penulis menggunakan teori Klientalisme yang dikembangkan oleh Aspinall dan Berenschot dalam kerangka pikir menjawab pertanyaan mengenai Klientalisme pada Pilkadaes.

Dalam politik, klientelisme adalah praktik tokoh atau partai politik yang memberikan bantuan materi atau lainnya kepada orang atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan mereka. Bantuan dapat berupa uang tunai, pekerjaan, penasihat hukum, atau layanan lainnya. Karena klientelisme merusak proses demokrasi dan melanggar gagasan tentang keadilan, maka klientelisme sering dianggap sebagai jenis korupsi politik. Ada tiga tahap dalam studi klientelisme. Pada tahap pertama, sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, ada sekelompok pelopor intelektual yang sebagian besar bekerja sebagai antropolog di Asia Tenggara dan sebagian besar adalah petani. Komunitas ini mulai merambah ranah politik setelah mengamati dinamika patron-klien yang terjadi diantara pemilik tanah dan juga buruh tani yang menggarap lahannya. Ketika buruh tani pertama kali mengandalkan bantuan pemilik tanah, tuan tanah sering kali memanfaatkan mereka.

Fase kedua klientalisme diciptakan pada awal tahun 1990-an dan 1980-an. Klientelisme sebagai taktik mobilisasi politik yang menggabungkan jaringan klientelisme yang terdiri dari banyak segmen, kelompok, dan partai politik merupakan topik utama pembahasan selama ini.

Klientalisme dengan definisi secara umum terdapat 2 Baik definisi makro maupun mikro, yaitu Makna yang berkaitan dengan pengertian klientelisme makro Menurut Lemarchand dan Legg (1972), klientelisme adalah hubungan di mana satu atau lebih aktor mengendalikan sumber daya yang tidak setara melalui interaksi yang bersifat timbal balik, personal, emosional, dan saling menguntungkan. Klientelisme didefinisikan oleh Briquet (2007) sebagai hubungan antara orang-

orang dengan status berbeda yang memerlukan perdagangan barang dan jasa timbal balik berdasarkan jaringan pribadi yang dipandang sebagai kewajiban moral oleh kedua belah pihak (Mulayadi, 2018).

Meskipun klientelisme didefinisikan sebagai mikro, definisi mikro lebih menekankan pada pertukaran produk atau layanan sosial untuk mendapatkan dukungan politik. Menurut Piattoni (2001), klientelisme termasuk dalam kategori mikro dan merupakan pertukaran suara atau jenis dukungan lain untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan (Mulayadi, 2018).

Dengan demikian, hubungan antara buruh tani dan bangsawan digunakan untuk menggambarkan klientelisme yang mulai muncul antara kandidat politik dan pemilih untuk memberikan timbal balik. Akibatnya, hal ini terjadi dalam pemilu Indonesia, di mana masyarakat telah mengandalkan bentuk administrasi personalistik sejak era kerajaan (Nordholt, 2015). Menurut para ilmuwan, klientelisme merupakan jenis interaksi sosial yang unik dalam dan dari dirinya sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Lemarchard dan Legg (1972) di buku *Demokrasi For Sale*, klientelisme politik, misalnya, merupakan bentuk interaksi yang pada dasarnya antara klien dan aktor yang selanjutnya akan menganut gagasan keuntungan timbal balik. Namun, ada tiga gelombang klientelisme secara umum yang di kemukakan oleh Aspinal dan Berenschot di buku *Democrasi For Sale*: institusionalis, marketis, dan kulturalis.

Gelombang pertama institusionalisme menciptakan lembaga negara, menawarkan validasi, dan bahkan diprediksi mampu menghentikan politisi yang berusaha mendorong kebijakan klientalis. Pada akhirnya, negara akan mampu melepaskan diri dari kebijakan klientalis, atau bahkan sebaliknya, menjebak 13 orang dalam kebijakan klientalis yang semakin ketat. Ketika pemerintah atau birokrasi memiliki cukup waktu untuk berkembang menjadi entitas yang kuat dan independen, hal ini dapat mengurangi klientalis politik. Namun, pada lembaga yang

lebih lemah, perilaku klientalis juga dapat ditemukan di lembaga pemerintah. Misalnya, dalam masalah anggaran, proses klientalis bahkan melibatkan pembelian dan penjualan jabatan.

Gelombang kedua bersifat marketis, ketika politisi menyoroti kelebihan dan kekurangan pertukaran dengan menghitung biaya dan manfaatnya. Konsep ini berimplikasi pada rasionalitas tindakan politik, karena pemilih menggunakan surat suara mereka untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi mereka jika terjadi kemenangan pemilihan umum, sementara politisi memanfaatkan pengaruh maksimal mereka untuk memengaruhi suara pemilih selama pemilihan (Kramon, 2016). Adanya klien pasar dapat mengurangi praktik klien secara tidak langsung melalui pengaruh politik dan pasar.

Hubungan patron-klien dibentuk oleh norma dan cita-cita masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh gelombang ketiga kulturalisme. Dengan menggunakan metode ini, para ilmuwan sering mencatat bagaimana elit politik diharapkan untuk membalas, dengan dukungan dari kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Menurut Lawson (2014) di buku *Demokasi For Sale*, hal ini mengarah pada fokus pada budaya itu sendiri, yang akhirnya berkembang menjadi perilaku timbal balik yang menjadi adat istiadat. Dalam masyarakat, nilai-nilai budaya dan tradisional sering dikaitkan dengan fenomena klientelisme budaya. Tradisi patron-klien adalah tradisi di mana kesetiaan dan timbal balik membentuk dasar hubungan antara patron dan klien, untuk memperkuat ikatan budaya antara patron dan klien melalui simbolisme klientelisme itu sendiri. Penyaluran bantuan sosial atau perencanaan proyek pembangunan adalah dua contoh bagaimana praktik-praktik ini sering kali mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat. Contoh-contoh lain termasuk ritual keagamaan yang menjunjung tinggi hubungan dan memvalidasi patron, simbol kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap kebijakan .

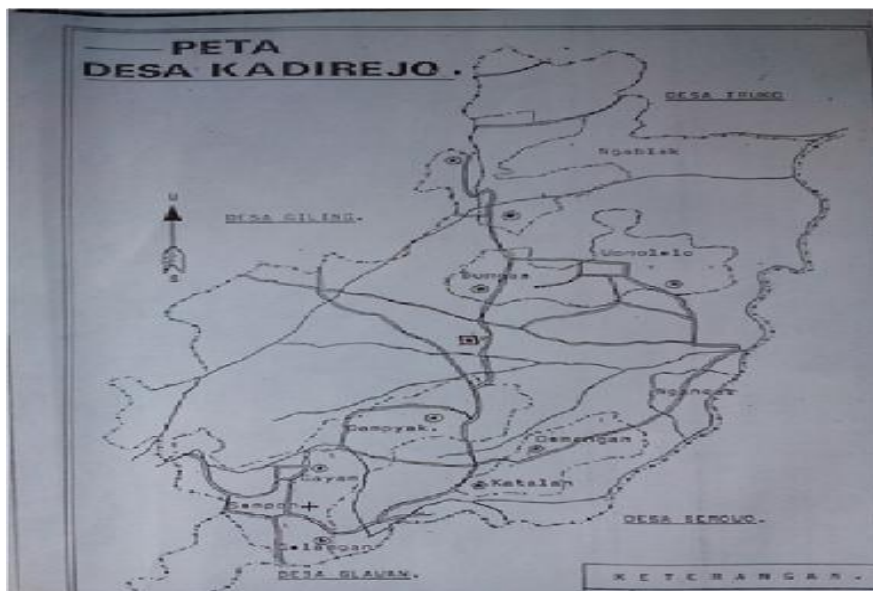
BAB III

PROFIL DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG

A. Kondisi Geografis dan Topografis Desa Kadirejo

Dengan luas wilayah 333 hektare, Desa Kadirejo merupakan desa di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini secara administratif terbagi atas 8 dusun, 8 RW, dan 24 RT. Desa Kadirejo terletak secara strategis karena berada di antara jalan raya yang menghubungkan Desa Bringin dan Desa Bancak dengan Kota Salatiga. Letak yang strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan desa. Dari 3.233 penduduk Desa Kadirejo, terdapat 1.058 KK. Dari jumlah tersebut, 1.581 KK adalah laki-laki dan 1.652 KK adalah perempuan.

Gambar 1. Peta Desa Kadirejo



Sumber: Profil Desa Kadirejo

Batas wilayah administrasi Desa Kadirejo berbatasan dengan enam kelurahan tetangga. Desa ini berbatasan dengan Desa Giling di sebelah barat, Desa Glawan dan Desa Bejaten di sebelah selatan, Desa Semowo di sebelah

timur, dan Desa Truko di Kecamatan Bringin di sebelah utara. Desa Kadirejo berjarak 6 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten +- dan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dengan kendaraan bermotor. Ibu Kota Kabupaten +- berjarak 50 km dan dapat ditempuh dalam waktu satu jam dengan kendaraan bermotor. Selain itu, diperlukan waktu dua jam untuk menempuh perjalanan sejauh 75 km dengan kendaraan bermotor menuju Ibu Kota Provinsi (-+).

Ketinggian wilayah Desa Kadirejo berkisar antara 459 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan Dusun Wonolelo sebagai dusun terendah dan Dusun Gelangan sebagai dusun tertinggi. Desa Kadirejo dapat dibagi menjadi empat bagian berdasarkan tingkat kemiringannya, yaitu daerah datar (kemiringan 0–20) seluas 218 hektare, daerah bergelombang (kemiringan 2–150) seluas 78,5 hektare, daerah curam (kemiringan 15–400) seluas 24,5 hektare, dan daerah sangat curam (kemiringan >400) seluas 12 hektare.

B. Kondisi Demografis Desa Kadirejo

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data sensus penduduk Desa Kadirejo tahun 2019, jumlah penduduk di desa tersebut adalah 3.485 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.725 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.760 jiwa. Berikut ini adalah informasi sebaran penduduk di setiap RW pada tahun 2024:

Tabel 1. Data Penduduk Desa Kadirejo

NO	RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	001	149	141	290
2	002	355	374	729
3	003	131	109	240
4	004	210	210	420
5	005	230	218	448

6	006	297	315	612
7	007	227	265	492
8	008	112	111	223
Jumlah		1.725	1.760	3.485

Sumber : Buku Monografi Desa Kadirejo Tahun 2019

Dengan jumlah penduduk keseluruhan 729 jiwa, RW 002 dilaporkan memiliki jumlah penduduk terbanyak berdasarkan tabel sebelumnya. RW 006 memiliki jumlah penduduk 612 jiwa, disusul RW 007 yang berpenduduk 492 jiwa, RW 005 yang berpenduduk 448 jiwa, RW 004 yang berpenduduk 420 jiwa, RW 003 yang berpenduduk 240 jiwa, dan RW 008 yang berpenduduk 223 jiwa.

Jumlah penduduk Desa Kadirejo menurut jenis kelamin pada tahun 2019 adalah 1.725 jiwa laki-laki dan 1.760 jiwa perempuan dari total penduduk sebanyak 3.485 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Kadirejo menurut jenis kelamin pada tahun 2024:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.725
2	Perempuan	1.760
Jumlah Seluruh Penduduk		3.485

Sumber: Buku Monografi Desa Kadirejo Tahun 2019

Berdasarkan data statistik tersebut, jumlah penduduk Desa Kadirejo adalah 3.485 jiwa, dengan rincian 1.725 jiwa laki-laki dan 1.760 jiwa perempuan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Kadirejo lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

2. Penduduk Menurut Umur

Usia, menurut KBBI, adalah lamanya waktu seseorang hidup atau ada (sejak lahir atau diciptakan). Kita dapat menentukan sejauh mana rutinitas yang

dapat kita lakukan karena perbedaan usia kita. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rutinitas kita cenderung lebih sedikit saat kita bertambah tua dan sebaliknya. (Santika, 2015).

pentingnya usia sebagai kriteria yang muncul dalam sejumlah situasi, seperti perkembangan perilaku, kesetaraan pendidikan, pembagian hak kerja, dan sebagainya. Setiap kelompok usia memiliki kemampuan yang menjadikannya faktor penting dalam mengendalikan akses dan mengalokasikan sumber daya. Pengelompokan usia dapat membantu menyediakan akses ke berbagai layanan, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, hak dan kewajiban, dan fasilitas lainnya. Hal ini membantu dalam pengembangan sistem yang lebih tepat sasaran yang memperhitungkan persyaratan dan sifat setiap kelompok usia.

Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Umur

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	110	91	201
2.	5-9	144	117	261
3.	10-14	132	151	283
4.	15-19	138	129	267
5.	20-24	140	119	259
6.	25-29	130	153	283
7.	30-34	104	101	205
8.	35-39	126	109	235
9.	40-44	128	139	267
10.	45-49	120	135	255
11.	50-54	107	114	221
12.	55-59	88	109	183
13.	60-64	82	101	183
14.	65-69	79	70	149

15.	70-74	48	44	92
16.	Diatas 75	49	78	127
Jumlah		1.725	1.760	3.458

Sumber :Buku Monografi Desa Kadirejo Tahun 2019

Desa Kadirejo merupakan salah satu permukiman di wilayah Pabelan yang berpenduduk 3.458 jiwa. Kelompok umur merupakan penggolongan data demografi menurut umur.

3. Latar Belakang Menurut Pendidikan

Menggunakan pencapaian pendidikan sebagai tolok ukur kualitas penduduk. Kualitas sumber daya manusia Desa Kadirejo semakin baik seiring dengan meningkatnya capaian pendidikan. Berdasarkan data jenjang pendidikan di Desa Kadirejo tahun 2019, sebagian besar penduduknya, yakni sebanyak 896 jiwa, telah menamatkan pendidikan dasar atau sederajat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel berikut:

Tabel 4. Penduduk Menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah/Orang
1.	Tidak/Belum Sekolah	824
2.	Belum Tmat SD	239
3.	Tamat SD/Sederajat	896
4.	SLTP	667
5.	SLTA	676
6.	D I/D II	5
7.	D III	39
8.	S 1	135
9.	S 2	4
Jumlah		3.485

Sumber: Buku Monografi Desa Kadirejo Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah penduduk yang Tamat SD/Sederajat adalah 896 orang.

4. Latar Belakang Menurut Mata Pencarian

Penduduk di suatu wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis mata pencariannya. Mata pencarian mencakup kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mempertahankan hidup dan mencapai taraf hidup yang layak. Ragam dan jenis aktivitas ekonomi manusia bervariasi sesuai dengan kemampuan dan konteks geografis daerah tersebut. Berikut klasifikasi mata pencarian masyarakat di Desa Kadirejo:

Tabel 5. Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	836
2.	Mengurus Rumah Tangga	269
3.	Pelajar/Mahasiswa	509
4.	Pensiunan	15
5.	PNS	35
6.	TNI	2
7.	Kepolisian RI	1
8.	Perdagangan	9
9.	Petani/Pekebun	516
10.	Pertenak	1
11.	Transportasi	1
12.	Karyawan Swasta	751
13.	Karyawan BUMN	1
14.	Karyawan Honorar	1
15.	Buruh harian Lepas	157
16.	Buruh Tani/Perkebunan	15

17.	Dosen	1
18.	Guru	43
19.	Bidan	3
20.	Perawat	2
21.	Sopir	2
22.	Pedagang	7
23.	Perangkat Desa	19
24.	Kepala Desa	2
25.	Wiraswasta	287
	Jumlah	3.485

Sumber: Monografi Desa Kadirejo Tahun 2019

Mata pencarian penduduk Desa Kadirejo paling banyak adalah yang belum bekerja atau tidak bekerja sebanyak 836 orang, kemudia pelajar dan mahasiswa sebanyak 509 orang.

C. Profil Desa Kadirejo

1. Sejarah Desa Kadirejo

Nama Kadirejo sendiri merupakan gabungan nama dua orang tokoh penting dalam berdirinya Desa Kadirejo yang dulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Salatiga, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyadi, Kepala Desa. Karena Bapak Sumitro Reksomiharjo saat itu menjabat sebagai Camat, maka lahirlah nama Kadirejo yang berarti "Kadya Dadi Rejo" dengan tujuan agar Desa Kadirejo menjadi masyarakat yang maju. Desa Sempon, Sambirejo (sekarang bagian selatan Desa Bungas), dan Desa Wonolelo sudah ada sebelum keberadaan Desa Kadirejo pada tahun 1930-an. Dusun Wonolelo meliputi Dusun Ngablak, sedangkan Desa Sempon meliputi Dusun Sempon, Dusun Gayam, Dusun Demangan, dan Dusun Dampyak dan Dusun wonolelo meliputi Dusun Wonolelo, Dusun Bungas dan Dusun Ngablak. Karena pada saat itu belum ada balai desa di Dusun Sempon, maka Bapak Reksomiharjo menyelenggarakan balai desa di Dusun Dampyak yang bertempat di rumah kepala desa terpilih. Suasana di Desa Sempon tenteram. Berbeda dengan Dusun Wonolwlo. Kepala desa Desa Wonolelo terpilih, tetapi masyarakat tidak setuju sehingga ia tidak dapat melanjutkan jabatannya.

Setelah itu kevakuman keperintahan, sehingga Bapak Kadir, Camat Salatiga saat itu, memutuskan untuk menggabungkan kedua desa tersebut. Setelah penggabungan kedua desa pada tahun 1939 M, diputuskan bahwa mengingat letaknya yang strategis, Kantor Balai Desa Kadirejo akan berada di Dusun Bungas. Gelangan, Gayam, Dampyak, Demangan, Bungas, Wonolelo, Daleman, dan Ngablak merupakan bagian dari delapan dusun, delapan RW, dan dua puluh empat RT yang membentuk pemekaran Desa Kadirejo.

2. Visi dan Misi Desa Kadirejo

Semua rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa dengan penuh harapan dan berkelanjutan harus mampu mewujudkan Visi-Misi Kepala Desa, karena dokumen perencanaan ini merupakan uraian dari Dokumen RPJM Desa.

Selain sebagai Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, Visi-Misi Kepala Desa Kadirejo dipadukan dengan tujuan bersama masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan memajukan desa di masa mendatang. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, dimulai dari tingkat Dusun/RW dan berlanjut hingga ke tingkat desa..

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah telah dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan situasi masyarakat untuk enam tahun ke depan Desa Kadirejo Tahun 2019-2025 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KADIREJO BERMARTABAT DAN MANDIRI”

Dengan Visi tersebut, Kepala Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang periode 2019-2025 hendak mewujudkan Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang bermartabat dan mandiri.

2. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa Kadirejo Kecamatan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Revolusi mental di segala bidang
2. Menjalankan roda pemerintahan yang bersih jujur, adil dan amanah
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan transparan
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam

5. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan menciptaka lapangan kerja berbasis pertanian untuk pengetesan kemiskinan

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka di ambil langkah sebagai berikut:

1. Menata aparatur pemerintahan Desa kadirejo sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Kadirejo secara netral dan mandiri
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan
4. Meningkatkan dan memotifasi keagamaan terutama kegiatan muslimat Desa Kadirejo
5. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

BAB IV
BENTUK PRAKTIK KLIENTALISME YANG TERJADI PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI DESA KADIREJO
KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG

Pemilih, juru kampanye, atau ketidakseimbangan dalam bentuk bantuan atau imbalan nyata merupakan contoh klientelisme politik. Dengan memberikan bantuan, produk, atau uang kepada pemilih secara langsung atau berkelompok, mereka terlibat dalam politik klientelisme dalam upaya memenangkan pemilihan. Mereka diharapkan membalas budi dengan memberikan suara untuk politisi tersebut dengan cara ini.

Pemilihan Kepala Desa Kadirejo tahun 2019 juga diwarnai dengan politik klientelisme. Penting untuk memperhatikan jenis barang atau jasa yang diterima pelanggan dari pelanggan, termasuk :

1. Uang

Masyarakat menerima uang sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan demikian, jual beli suara dapat diartikan sebagai pemberian hadiah kepada calon pemilih untuk mempengaruhi pilihannya terhadap calon Kepala Desa, tanpa memperhatikan apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jual beli suara mencoreng cita-cita pemilu yang adil dan merupakan tindakan melawan hukum dalam pemilu yang korup. Jual beli suara, menurut praktisi akademis, secara umum dipahami sebagai praktik pembelian suara dengan memberikan insentif untuk pilihan memilih. Akan tetapi, untuk mendorong orang menggunakan hak pilihnya, metode jual beli suara lebih berfokus pada distribusi kepada pemilih tetap dan pemilih setia.

Adanya politik uang semakin menunjukkan keinginan calon kepala desa untuk menduduki jabatan tertinggi. Oleh karena itu, bagi sebagian orang ini merupakan tanda kejujuran. Jika mereka menerima uang, sebagian orang akan merasa dihargai karena merasa menjadi bagian dari masyarakat (Athaya, 2021). Masyarakat tidak menolak politik uang karena menerimanya tidak akan berdampak negatif bagi mereka. Ekonomi mereka juga akan diuntungkan dari politik uang. Mereka lebih diuntungkan menerima uang karena diasumsikan bahwa semua kandidat hanya ingin dilihat memiliki kedudukan oleh masyarakat. Karena semua kandidat pada akhirnya menghabiskan uang dalam upaya untuk "membeli suara." Pemberian uang tanpa memperhitungkan usia (berdasarkan kriteria) juga menghasilkan berbagai tujuan.

Sebenarnya, pembelian suara pemilih bukanlah hal yang melanggar hukum, hal itu akan terjadi karena pengawasan yang ketat. Meski begitu, kebijakan pemerintah telah menjelaskan bahwa seorang calon kepala desa menghadapi hukuman pidana dan administratif, termasuk diskualifikasi sebagai calon, jika ada bukti pembelian suara atau politik uang. Seiringan dengan penelitian ini, praktik klientalisme dengan menggunakan uang juga terjadi pada PILKADES tahun 2019 di Desa Kadirejo. Tujuan dari praktik ini tentu saja untuk memikat suara dari masyarakat agar memilih calon kepala desa tersebut. Berikut keterangan dari Bapak Riyadi selaku calon dan kepala desa terpilih pada PILKADES 2019,

“Sudah lumrah kita sebagai calon Kepala Desa memberikan uang kepada masyarakat dengan imbalan mereka memilih kita supaya terpilih. Lagipula jika kita ingin menang juga mengandalkan masyarakat setempat agar memilih kita sebagai Kepala Desa. Tetapi dengan money politik juga sudah tidak etis dan masih banyak terjadi di masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan kesadaran masyarakat, praktik manipolitik ini akan semakin berkurang. Pendapat ini mencerminkan sikap yang

realistis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sambil tetap berharap ada perubahan positif ke depannya.”

Ungkapan diatas sudah sangat biasa di saat pemilihan calon Kepala Desa agar calon tersebut dapat menang dalam pemilihan tersebut. Dalam pemilihan tersebut juga bertentang dalam pemilihan yang secara adil yang tidak mengikut sertakan urusan dengan menggunakan uang atau vote bunying dengan masyarakat diberikan imbalan yang sudah dijanjikan kepada calon yang menang. Kemudian tanggapan masyarakat dengan adanya pemberian uang tersebut diungkapkan oleh Ibu Sidah selaku masyarakat di Desa Kadirejo:

“Dimana calon Kepala Desa yang sudah memberikan uang maka itu yang akan kami pilih, pada saat itu jugakami akan memilih yang dimana mereka (calon kepala desa) yang memberikan kita uang yang paling banyak atau besar jumlah uang yang diberikan kepada kami.”

Ungkapan masyarakat masyarakat ini juga dapat mempertegas kualitas yang dimana sumber daya manusia calon yang tidak akan mempengaruhi kemenangan secara signifikan. Dan dapat dikaitkan juga dengan siapapun calon yang memberikan uang kepada masyarakat setempat dapatkan yang diartikan tidak akan terpilih atau menang dalam pemilihan Kepala Desa. Ungkapan diatas menunjukkan bahwa calon siapapun yang memberi uang paling banyak akan di pilih. Contohnya pada calon pada saat itu yang bernama Pak Riyadi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 perorang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara selaku bagian dari anggota Karang Taruna REMBUG yang bernama Nayla mengatakan bahwa :

“Dalam pemilihan pasti akan melakukan money politik, dengan adanya itu sudah pasti kita akan memilihnya. Apalagi jika calon tersebut membuat janji atau menjanjikan sebuah organisasi yang

mungkin akan memajukan organisasi karang taruna sudah pasti akan dipilih”.

Dalam wawancara dengan salah satu anggota karang taruna REMBUG yang berada di Desa Kadirejo dan masyarakat setempat dapat di simpulkan bahwa sebagian besar calon yang terpilih menang dengan menggunakan cara money politik atau politik uang. Melalui tim suksesnya, calon kepala desa beberapa hari menjelang pemilihan telah menyumbangkan dana untuk disalurkan kepada masyarakat atau organisasi yang menjadi sasaran, dengan mengidentifikasi mereka dan menghindari penargetan yang tidak disengaja. Meskipun penerima politik uang juga berupaya untuk melaksanakan keinginan calon yang telah menyumbangkan dana atau sumber daya, semua calon yang berbangga hati telah terpilih. Hal ini berlaku meskipun sejumlah calon telah memberikan kepada penerima manfaat politik uang, dan meskipun suara mereka terbagi, mereka tetap ingin menggunakan hak pilih mereka untuk kandidat tersebut.

Rendahnya perekonomian masyarakat, minimnya pengetahuan tentang politik uang, dan rasa kekeluargaan yang membuat mereka sulit menolak pemberian calon menjadi tantangan masyarakat dalam melawan praktik tersebut. Kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dengan tersedianya Kepala Desa. Meski tidak banyak yang diperoleh, namun sangat dinantikan. Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu menjadi penyebab ketidaktahuan dan kurangnya kesiapan untuk menghentikan politik uang. Politik uang cukup marak di masyarakat akibat kondisi sulit ini.

Teori klientalisme sesuai dengan praktik yang digunakan para calon dalam hal uang, karena hubungan timbal balik antara patron (politisi) dan klien (pemilih) yang disebutkan bahwa calon adalah patron dan masyarakat adalah klien, jadi patron atau calon memberikan uang sebagai tanda imbalan yang bermanfaat sehingga mendapatkan dukungan yang lebih dari masyarakat.

2. Pembangunan Pengembangan Desa Wisata Kadirejo 'Agro Park & Reseach Center bidang Pertanian dan peternakan

Pembentukan desa wisata dipandang sebagai salah satu cara membantu masyarakat mengelola daerahnya secara mandiri dan meningkatkan kesadaran akan potensi pariwisata di daerah tersebut sehingga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata (Rochman, 2016). Setiap desa harus didorong untuk menemukan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang unik, termasuk keindahan alam, kekayaan budaya, dan kehidupan masyarakat yang tertib. Dana desa yang berasal dari bantuan pusat dan daerah juga dapat digunakan untuk membangun desa wisata, meningkatkan destinasi wisata, atau menjalankan kampanye pemasaran untuk menarik lebih banyak pengunjung. Dana desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, memperluas ekonomi desa, membina layanan publik yang lebih baik di dalam desa, dan menutup kesenjangan pembangunan antardesa.

Desa wisata dapat menciptakan berbagai elemen yang berhubungan dengan pariwisata, seperti lanskap, kuliner dan minuman, kenangan, dan kebutuhan lainnya. Desa wisata adalah lokasi pedesaan yang menyediakan lingkungan komprehensif yang menangkap keaslian desa sebagaimana diamati melalui ritual sehari-hari, arsitektur bangunan, kehidupan sosial budaya, dan tata letak desa. Desa wisata, sebagaimana didefinisikan oleh Inskeep (1999), adalah lokasi tempat sejumlah kecil wisatawan tinggal di atau dekat dengan lingkungan tradisional, sering kali di desa-desa terpencil dan memperoleh pengetahuan tentang lingkungan lokal dan kehidupan pedesaan (Rochman, 2016).

Tim Pena Cendekia mendefinisikan desa wisata sebagai berikut: "Pembangunan desa yang memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas bagi penduduknya, seperti transportasi atau akomodasi" (Sari,

2014). Menurut definisi ini, desa wisata adalah pembentukan masyarakat yang memiliki potensi wisata, kualitas alam atau lingkungan, dan fasilitas untuk mendorong pertumbuhan desa dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian penduduk setempat.

Praktik klientalisme dalam pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2019 yang dimenangkan oleh Pak Riyadi dengan melakukan praktik pengembangan pembangunan desa wisata. Wawancara dengan Pak Riyadi selaku Kepala Desa,

“Saya membangun desa wisata ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena dengan adanya desa wisata diharapkan ada peningkatan ekonomi warga melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Juga sebagai hiburan warga di desa wisata itu juga dirancang untuk menyediakan tempat hiburan bagi warga, sehingga mereka tidak perlu jauh untuk mencari rekreasi.”

Dari wawancara Kepala Desa dapat diartikan bahwa pengembangan pembangunan desa wisata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai hiburan masyarakat desa. Gagasan Bhineka Tunggal Ika harus dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah sambil menciptakan permukiman wisata. Dengan gagasan bahwa keistimewaan desa hanya berfungsi untuk menonjolkan karakter uniknya. Desa Kadirejo adalah rumah bagi berbagai budaya, keindahan alam, kerajinan, dan hal-hal lainnya.

Salah satu masyarakat yang bernama Pak Priyono selaku masyarakat Desa Kadirejo, mengutarakan pendapatnya tentang pengembangan pembangunan desa wisata:

“pembangunan desa wisata yang dilakuakn Kepala Desa tersebut sangatlah berguna, dikarenakan merupakan salah satu usaha untuk desa untuk di desa agar lebih dikenal lagi oleh orang-orang yang berada di luar desa”.

Dari wawancara tersebut, masyarakat terutama dari Pak Priyono mengharapkan bahwa dengan adanya pengembangan pembangunan desa wisata di desa ini akan mengenalkan berbagai budaya atau semacam lainnya yang berada di Desa Kadirejo ini. Dengan adanya desa wisata maka desa akan lebih dikenal dikalangan luar dengan ciri khas yang ada di desa tersebut.

Terkait potensi desa, setiap aspek desa berpotensi menjadi destinasi wisata. Selain itu, Desa Kadirejo dapat menampilkan adat istiadat, budaya, lingkungan, dan aktivitas yang mungkin tidak dapat ditawarkan oleh desa lain. Dengan demikian, tatanan sosial masyarakat setidaknya memberikan optimisme bahwa komponen wisata yang diciptakan dan dibangun tidak dapat dilepaskan dari cara hidup mereka. Namun selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan lokasi yang layak untuk hidup. Kelangsungan hidup seluruh ekosistem bergantung pada perlindungan dan pelestarian alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa wisata, masyarakat dan pemerintah harus terlebih dahulu bersepakat.

Dalam pembangunan pengembangan desa wisata di Desa Kadirejo ini, sesuai dengan praktik teori klientalisme yang digunakan oleh calon kepala desa, hubungan calon kepala desa dengan pengembangan pembangunan desa wisata ini sebagai cara untuk meraih suara dan simpati dari masyarakat. Dengan adanya timbal balik dari calon dan juga masyarakat Desa Kadirejo pun sama-sama menguntungkan dalam hal material ataupun non-material.

Dalam pembangunan pengembangan desa wisata ini, merupakan sebuah janji yang dilakukan oleh calon terpilih yaitu Bapak Riyadi dengan menggunakan kampanye agar masyarakat bisa memilih Bapak Riyadi tersebut dengan menyumbangkan suara yang diperoleh dari masyarakat. Dengan membangun pengembangan desa wisata ini juga bertujuan dapat menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat Desa Kadirejo. Pengembangan pembangunan desa wisata yang berada di Desa Kadirejo tersebut dapat menguntungkan bagi masyarakat Desa Kadirejo begitu pula

dengan Bapak Riyadi. Mengapa demikian begitu, karena dengan adanya pengembangan pembangunan desa wisata ini Desa Kadirejo dapat dikenal luas oleh masyarakat di luar Desa Kadirejo. Dan juga dapat menguntungkan masyarakat Desa Kadirejo itu sendiri karena dapat memungkinkan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang berada di desanya sendiri.

3. Pengadaan Internet Desa hasil kerja sama Dengan Suryanett

Menurut As'ad (2021), internet merupakan sistem yang jaringan komputer global yang dihubungkan seluruh perangkat komputer di seluruh dunia melalui protokol (TCP/IP). Saat ini, dengan segala sesuatu yang bergantung pada teknologi, penggunaan internet menjadi kebutuhan dasar. Penggunaan internet sebagai alat komunikasi berbasis media sosial, akses layanan publik, penjualan produk UMKM, dan transaksi perbankan hanyalah beberapa manfaat penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai komponen penting komunikasi dan teknologi, Internet menghubungkan komputer menggunakan protokol kontrol transmisi (TCP) standar internasional. Internet memudahkan komunikasi dan berbagi informasi melalui satelit, jaringan kabel, dan jaringan nirkabel. Kita dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain yang tinggal jauh dari kita dengan menggunakan teknologi ini. Di era digital, ini merupakan persyaratan mendasar yang memenuhi tuntutan masyarakat (Pambudiyatno, 2023).

Internet sendiri didefinisikan sebagai jaringan komunikasi terbuka di seluruh dunia yang menggunakan saluran komunikasi seperti satelit dan telepon untuk menghubungkan jutaan atau mungkin miliaran jenis jaringan komputer yang berbeda. Awalnya, internet adalah jaringan komputer yang dibuat pada tahun 1969 sebagai bagian dari proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan AS.

Internet muncul sebagai sarana utama baru komunikasi manusia sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi. Internet secara bertahap namun pasti menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejak peluncurannya secara luas pada tahun 1982. Internet dengan cepat menjadi komponen penting dari pola komunikasi interpersonal di negara ini, meskipun awalnya merupakan "barang mewah" yang hanya tersedia untuk wilayah tertentu. Setelah lonjakan signifikan dalam "pengadaan internet" di awal tahun 2000-an, internet menjadi "makanan wajib" dalam industri informasi dan komunikasi. Gelombang besar ini ditandai dengan banyaknya layanan operator dan penyedia internet, serta biaya koneksi internet yang terus meningkat hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, internet telah menggantikan sejumlah media komunikasi dan informasi masa kini dalam waktu yang singkat. Internet telah menggantikan surat, telegram, surat kabar, telepon, dan bentuk media lainnya. Hal ini terjadi karena internet dianggap lebih produktif dan efisien di tempat kerja, terutama dalam hal informasi dan komunikasi.

Dalam praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 tentang pengadaan internet desa memiliki manfaat terhadap masyarakat Desa Bungas. Berikut keterangan dari Bapak Riyadi selaku calon dan kepala desa terpilih pada PILKADES tahun 2019:

“jadi pengadaan internet ini memiliki tujuan mbak seperti, memudahkan akses informasi dan memudahkan warga dalam urusan teknologi.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kadirejo. Hal itu merujuk pada kondisi Desa Kadirejo yang sangat susah untuk mengakses sinyal. Dengan adanya pengadaan internet ini, calon kepala desa atas nama Bapak Riyadi waktu itu mengharapakan bahwa program ini dapat memiliki manfaat

untuk seluruh masyarakat Desa Kadirejo dalam memudahkan akses berbagai layanan informasi dan layanan melalui internet.

Keterangan tersebut diperkuat dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Priyono selaku warga Desa Kadirejo yang terkendala akses internet:

“pengaruh desa ada, karena mempermudah sistem komunikasi. Sekarang kebanyakan lewat menggunakan internet.”

Dari keterangan tersebut memang benar bahwa pengadaan internet ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Kadirejo. Selain memudahkan akses internet yang baik, pengadaan internet ini juga berpengaruh untuk meningkatkan ilmu teknologi masyarakat yang terbilang masih minim. Sehingga dengan adanya janji yang disampaikan oleh calon kepala desa dalam PILKADES 2019 Desa Kadirejo dapat memberikan peluang besar dalam menarik suara dari masyarakat.

Teori klientalisme sesuai dengan praktik yang digunakan para calon dalam hal pengadaan internet, karena hubungan timbal balik antara patron (calon kepala desa) dan klien (pemilih) yang disebutkan bahwa calon adalah patron dan masyarakat adalah klien. Dengan adanya pengadaan internet calon dapat menarik suara dari masyarakat. Selain itu masyarakat juga untung karena mendapatkan fasilitas pengadaan internet yang dibangun oleh calon kepala desa.

4. Peningkatan Infrastruktur Desa (sarpras Desa kadirejo seperti jalan poros, jalan usaha tani serta pembangua talud dalam rangka mendukung perekonomian Desa Kadirejo)

Infrastruktur, menurut Canning dan Pedroni (2004), memiliki sifat eksternalitas. Jalan raya, pendidikan kesehatan, dan fasilitas lainnya memiliki fitur eksternalisasi yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa

fasilitas yang ditawarkan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas bermanfaat yang berpotensi meningkatkan output dari setiap input yang digunakan dalam proses manufaktur. Jalan raya utama, jalan pedesaan, dan pembangunan tanggul merupakan contoh infrastruktur dalam penelitian ini. Mankiw (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai jenis modal publik yang diciptakan oleh investasi pemerintah. Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003), sistem infrastruktur terdiri dari bangunan, mesin, dan instalasi fundamental yang dibangun dan diperlukan untuk pengoperasian sistem sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat (Fajri, 2017).

Bagi mereka yang memiliki pengalaman bertani, pembangunan infrastruktur ini sangat penting. Infrastruktur adalah sistem fisik yang memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur adalah fasilitas, bangunan dasar, mesin, atau instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi suatu masyarakat (Mamonto, 2018). Desa yang tangguh, maju, dan mandiri akan menjadi hasil pembangunan infrastruktur desa. Pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara profesional dan bijaksana agar masyarakat dapat hidup tanpa terkekang oleh infrastruktur desa yang kurang memadai (Afifah, 2023). Para pelaku pelaksana harus memahami kebijakan dana desa di setiap jenjang pelaksanaannya, terutama dalam hal pengelolaan dana yang digunakan untuk membiayainya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Dalam praktik klientalisme yang dilakukan pada pemilihan kepala desa 2019 dalam pembangunan infrastruktur desa ternyata memiliki maksud tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riyadi selaku calon dan kepala desa terpilih:

“jadi pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat dalam beraktivitas selain itu meilihat dari latar belakang pekerjaan mayoritas penduduk Dusun Bungas adalah petani sehingga dalam hal ini pembangun infrastruktur tersebut dapat memudahkan petani dalam bekerja.”

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur yang dijanjikan oleh calon kepala desa memiliki tujuan dan maksud tertentu. Salah satunya adalah untuk mendukung transportasi dan mobilitas serta meningkatkan daya tarik pemuda dalam bidang pertanian. Jalan-jalan yang sudah terleasasikan ini diharapkan dapat memudahkan akses transportasi terkhusus untuk petani dalam membawa hasil panen dan keperluan tani lainnya. Selain itu, dengan akses infrastruktur dengan lebih baik diharapkan pemuda desa lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pertanian.

Keterangan tersebut diperkuat oleh dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Priyono selaku masyarakat Desa Kadirejo:

“sangat berguna, jalan poros merupakan sarana transopratasi yang uatama, terus saluran irigasi juga mambantu kaum petani agar mempelancar saluran sistem irigasi pertahanan agar lebih lancar agar bisa meningkatrkan hasil pertanian.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur sangatlah berguna bagi masyarakat teutama bagi petani yang berada di Desa Kadirejo. Pembangunan infrastruktur tersebut di bangun agar masyarakat di Desa Kadirejo yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani dapat menngunakan jalan atau akses sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur oleh calon kepala desa agar dapat meningkatkan hasil yang diperoleh dari bertani.

Teori klientalisme sesuai dengan praktik yang digunakan para calon dalam peningkatan infrastruktur desa, karena hubungan timbal balik antara patron (calon kepala desa) dan klien (pemilih) yang disebutkan bahwa calon adalah patron dan masyarakat adalah klien, sebagai tanda imbalan yang bermanfaat sehingga mendapatkan dukungan yang lebih dari masyarakat.

5. Pembentukan dan pengembangan Kelompok usaha bersama dalam rangka mendukung kegiatan UMKM di Desa

Kemajuan teknologi kini dapat mempermudah dan mempercepat berbagai aspek setiap aktivitas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan komunikasi antarmanusia kini dapat berlangsung tanpa batas dan tanpa batas, terutama dalam hal jarak. Para pelaku usaha dapat mengabaikan teknologi era digital saat ini, tetapi mereka harus dapat memanfaatkan kemajuan digital karena kemajuan tersebut memungkinkan mereka untuk memasarkan barang dagangan mereka baik secara daring maupun luring (Wijaya, 2022).

Baik pemerintah maupun pelaku usaha sendiri menaruh perhatian pada kegiatan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Melalui menteri dan lembaga yang bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Pengembangan sumber daya manusia akan didasarkan pada kegiatan-kegiatan ini, yang meliputi program kewirausahaan dan kolaborasi (Wijaya, 2022). Sumber daya manusia—mereka yang memiliki gelar sarjana, tingkat kreativitas yang tinggi, dan kemampuan untuk mempelajari teknologi—merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan keberhasilan UMKM. Sumber daya ini juga dapat membantu UMKM beroperasi dengan lebih baik.

Perekonomian bangsa, khususnya Indonesia, sangat bergantung pada UMKM. Namun, UMKM masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan bisnisnya. Jika UMKM diberikan kondisi yang tepat, seperti persaingan yang adil, kebijakan ekonomi yang tidak diskriminatif, akses yang luas terhadap pasar dan modal, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan berbagai pilihan layanan pengembangan bisnis berkualitas tinggi, mereka dapat mengembangkan potensi bisnis mereka. Karena struktur organisasinya yang kecil, UMKM biasanya tidak memiliki potensi untuk menyediakan layanan pengembangan bisnis mereka sendiri. UMKM dipandang memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan karena mereka merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, kontributor penting bagi pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, produsen dan sumber inovasi baru, dan kontributor neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Nuraeni, 2018).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian suatu daerah. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perekonomian, meskipun dianggap sebagai usaha kecil jika dibandingkan dengan aset dan pendapatan usaha lain (Nurussofiah, 2023). UMKM merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi bangsa. UMKM adalah salah satu bentuk usaha dalam perekonomian yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Dalam praktik klientalisme yang dilakukan pada pemilihan kepala desa tahun 2019 dalam pembentukan kelompok tani dan UMKM desa yang menuai tujuan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riyadi selaku calon dan kepala desa terpilih:

“Jadi pembentukan kelompok usaha tani dan UMKM ini selain untuk memperoleh suara dari masyarakat juga memiliki tujuan mbak, tujuannya ya untuk mempermudah pembinaan

dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan kelompok usaha tani dan UMKM sebagai bagian dari praktik klientalisme yang dilakukan oleh calon kepala desa memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan. Dengan adanya kelompok lebih mudah bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan memberikan bantuan atau stimulan bagi usaha masyarakat. Selain itu juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga melalui usaha bersama sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Priyono selaku masyarakat Desa Kadirejo:

“ya kalau tentang pembentukan kelompok tani yang sudah terlerealisasikan saat ini memiliki banyak manfaat mbak, salah satunya manfaatn yang ddaptkan dari pemerintah desa karna dengan berkelompok petani akan semakin mudah dalam berkerja tentunya. Selain itu juga lebih mudah dalam mengakses jaringan ke pemerintah desa apabila sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. Untuk UMKM sendiri sangat bermanfaat dalam memasarkan produk kepada pembeli.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik klientalisme yang dilakukan oleh calon kpala desa selain untuk memperoleh usara dari masyarakat juga memliki dampak yang baik serta menguntungkan untuk masyarakat dalam mendukung pertanian dan juga pengembangan UMKM.

Teori klientalisme sesuai dengan praktik yang digunakan para calon dalam pembentukan dan pengembangan kelompok usaha UMKM, karena hubungan timbal balik antara patron (calon kepala desa) dan klien (pemilih)

yang disebutkan bahwa calon adalah patron dan masyarakat adalah klien, sebagai tanda imbalan yang bermanfaat sehingga mendapatkan dukungan yang lebih dari masyarakat. Dengan adanya praktik klientalisme ini masyarakat dapat terbantu dalam memasarkan produk yang ingin diperjualbelikan.

6. Pengembangan BUMDes Jaya Mandiri

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup setiap orang, bangsa, dan negara. Karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Hal ini berdampak besar terhadap upaya menciptakan stabilitas negara (Yusuf, 2016). Lebih jauh, karena desa berfungsi sebagai landasan perencanaan dan pencapaian tujuan negara di tingkat desa serta untuk mengenali masalah-masalah masyarakat, lokasinya dianggap penting dalam pembangunan negara. Desa diposisikan sebagai sasaran pembangunan pedesaan untuk menutup beberapa kesenjangan yang dapat dicapai.

Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi desa merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menurut Budiono (2015). Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Yusuf, 2016). Pemerintah desa dan masyarakat mengawasi pelaksanaan dan kepemilikan modal BUMDes. Menurut Gunaman (2011), pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan yang berbasis adat, berbasis program pemerintah, dan kegiatan lain yang mendukung inisiatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Yusuf, 2016). Dalam rangka menggerakkan potensi desa dan membantu upaya penanggulangan kemiskinan, maka harus ada BUMDes. Bahwa pendirian

BUMDes merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dengan mewujudkan kota ekonomi yang otonom.

Pengembangan BUMDes harus dituntaskan agar BUMDes yang telah berdiri dapat menjalankan tugasnya. Sasaran dan sumber daya BUMDes dapat tercapai secara terarah dan tepat sasaran. Permasalahan desa dapat diselesaikan dengan BUMDes. Diharapkan BUMDes dapat mendukung dan menggerakkan perekonomian desa. BUMDes dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru dengan mengelola kemampuan kreatif dan inovatif desa.

Dalam praktik klientalisme pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 dalam pembangunan BUMDes memiliki tujuan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riaydi selaku calon dan kepala desa terpilih:

“Sebenarnya pembangunan BUMDes ini memiliki tujuan mbak seperti, menciptakan sumber pendapatan asli desa (PADes) selain itu dalam program ini kalau terealisasikan dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, mengakomodir produk-produk desa, dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa serta mengakomodir aspirasi masyarakat desa.”

Dari informasi di atas jelas bahwa tujuan pengembangan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa tidak lagi harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah karena BUMDes menyediakan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Berbagai kebutuhan desa dan inisiatif pembangunan berdasarkan tujuan masyarakat kemudian dapat didanai dengan menggunakan pendapatan ini. Selain itu, BUMDes berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Warga desa dapat bekerja di kampung halaman mereka daripada pindah ke kota berkat beberapa unit bisnis yang dikelola

oleh BUMDes, seperti perdagangan, pengolahan hasil pertanian, atau pariwisata. Hal ini tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran di dusun tersebut. Barang-barang hasil produksi warga setempat, seperti kerajinan tangan, hasil pertanian, atau makanan khas desa, juga dapat ditemukan di BUMDes.

BUMDes membantu mempromosikan produk-produk tersebut dengan bertindak sebagai distributor atau fasilitator, yang meningkatkan harga jual dan pendapatan bagi pelaku usaha daerah. Selain itu, BUMDes, perusahaan yang dikelola oleh dewan desa, diharapkan dapat menjadi penyumbang utama bagi perekonomian daerah. Pengelolaan yang profesional dari berbagai kelompok usaha memungkinkan BUMDes untuk memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, BUMDes didirikan untuk mendukung tujuan masyarakat desa selain tujuan ekonomi. Program-program yang diinginkan masyarakat, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya, dapat didanai dengan menggunakan uang yang diperoleh BUMDes.

Teori klientalisme sesuai dengan praktik yang digunakan para calon dalam pengembangan BUMDes, karena hubungan timbal balik antara patron (calon kepala desa) dan klien (pemilih) yang disebutkan bahwa calon adalah patron dan masyarakat adalah klien, sebagai tanda imbalan yang bermanfaat sehingga mendapatkan dukungan yang lebih dari masyarakat. BUMDes membantu mempromosikan produk-produk tersebut dengan bertindak sebagai distributor atau fasilitator, yang meningkatkan harga jual dan pendapatan bagi pelaku usaha daerah.

BAB V
DAMPAK PRAKTIK KLIENTALISME PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA TAHUN 2019 DI DESA KADIREJO

Dampak positif dan negatif dirasakan oleh warga Desa Kadirejo, khususnya Dusun Bungas, sebagai akibat dari praktik klientelisme yang dilakukan oleh para calon kepala desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Dampak positif tersebut antara lain adalah menurunnya instabilitas sosial, meningkatnya jaringan dan dukungan sosial, serta kemudahan akses terhadap sumber daya. Dampak yang lebih merugikan adalah meningkatnya korupsi, melemahnya sistem demokrasi, dan penyalahgunaan hukum. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dampak klientelisme.

A. Dampak Positif

1. Peningkatan Kesadaran Berpolitik Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting bagi tercapainya tujuan organisasi adalah sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan, sumber daya manusia memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya. Jika sumber daya manusia yang menggunakannya tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, sumber daya berteknologi tinggi pun akan sia-sia. Mirip dengan sumber informasi, tidak peduli seberapa menyeluruh dan berkualitasnya informasi tersebut, akan sia-sia jika sumber daya manusia organisasi saat ini tidak dapat mengubahnya menjadi pengetahuan yang akan membantunya tumbuh dan maju.

Rendahnya sumber daya manusia dalam praktik klientelisme yang dipermasalahkan membuat orang lebih mudah membenci orang lain. Berpikir secara berbeda dari demokrasi merupakan hal yang lumrah. Sudut pandang yang berbeda dipandang sebagai musuh dalam

masyarakat ilmiah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pendidikan politik yang tidak memadai. Dalam beberapa situasi, klientelisme juga akan sulit dicegah. Rendahnya mutu sumber daya manusia akan menyebabkan orang mempertimbangkan untuk menjadi pemimpin dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan kewajibannya kepada pengikutnya. Selain itu, klientelisme tidak lagi dipandang sebagai hubungan yang didasarkan pada panutan. Sebab, sumber daya manusia yang rendah dan orang miskin akan menjadi sasaran pola sebaran klientelisme.

Dalam praktik klientelisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 tidak jauh dari faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik sehingga praktik klientelisme ini akan leluasa terjadi dalam PILKADES selanjutnya di desa tersebut. Tetapi praktik klientelisme yang sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya secara tidak langsung juga menumbuhkan pengetahuan berpolitik masyarakat dalam menilai praktik klientelisme. Berikut keterangan dari Bapak Riyadi selaku calon kepala desa yang terpilih pada PILKADES 2019:

“Selain lumrah terjadi, pemberian bantuan dari calon kepala desa waktu PILKADES juga memiliki dampak positif untuk masyarakat mbak. Ya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menilai apakah praktik klientelisme itu boleh dilakukan atau tidak, adil atau tidak.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik klientelisme ini memiliki dampak positif terhadap kesadaran masyarakat akan berpolitik. Masyarakat mulai mempertimbangkan praktik klientelisme yang terjadi selama ini pada PILKADES di Desa Kadirejo, terkhusus tahun 2019. Sehingga dari pertimbangan masyarakat tersebut dalam menilai praktik klientelisme memperlihatkan bahwa pengetahuan berpolitik masyarakat semakin

meningkat dengan adanya praktik tersebut. Hal itu diperkuat keterangan dari Nayla sebagai bagian dari Karang Taruna REMBUG:

“Sebenrnya aku juga gak tau ya mbak, bantuan yang diberikan calon kepala desa waktu itu untuk karang taruna boleh diterima atau ngga. Tapi aku juga punya pikiran kalau bantuan dari calon kepala desa waktu itu untuk karang taruna seakan-akan menyuap para anggota karang taruna agar memberikan suara untuk calon tersebut.”

Dari keterangan tersebut dapat diketahui jika praktik klientalisme yang terus terjadi pada PILKADES khususnya di Desa Kadirejo memiliki dampak akan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Pertimbangan dari masyarakat akan praktik tersebut menunjukkan bahwa saat ini masyarakat mulai memperlihatkan kemajuan dalam menilai cara berpolitik calon kepala desa yang masih menggunakan praktik tersebut ternyata kurang tepat. Sehingga dalam menilai praktik tersebut, masyarakat tidak akan ikut terjerumus dengan mengatakan wajar saja kalau praktik ini terjadi pada PILKADES tetapi juga melihat kekurangan dari praktik ini jika terus menerus dilakukan.

2. Pemberian Akses dan Bantuan terhadap Sumber Daya Manusia

Semua karyawan yang bekerja untuk suatu perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan dianggap sebagai sumber daya manusia. Menurut Ndara (1999) yang dikutip oleh Sutrisno (2009), sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah mereka yang dapat menghasilkan nilai-nilai komparatif sekaligus nilai-nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi—seperti kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi—daripada hanya menggunakan energi mentah—seperti bahan baku, tanah, air, kekuatan otot, dan sebagainya. Suatu organisasi dapat menggunakan sumber daya manusia, yang didefinisikan sebagai sumber daya yang berasal dari

orang-orang. Sumber daya manusia, sebagaimana dinyatakan oleh interpretasi ini, adalah orang-orang yang memiliki sumber daya dan wewenang. Menurut berbagai interpretasi ini, sumber daya manusia adalah aset dengan potensi, kontribusi, dan peran yang memengaruhi upaya untuk mencapai tujuan organisasi (Huzain, 2021).

Praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 di Dusun Bungas juga memiliki dampak terhadap masyarakat dalam menuntaskan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pekerjaan dan pemberian layanan yang meningkat untuk masyarakat. Dalam praktik klientalisme, calon kepala desa sering memberikan bantuan langsung berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya untuk menarik dukungan pemilih. Hal ini dapat bermanfaat untuk pemilih yang membutuhkan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Bantuan ini bisa berupa bantuan sosial, perbaikan infrastruktur kecil, atau bahkan pemberdayaan ekonomi lokal bagi masyarakat desa. Berikut keterangan dari Ibu Sidah selaku masyarakat Desa Kadirejo:

“Ya pas itu calon kepala desa ngasih uang biar di pilih mbak, ya di kasih uang siapa yang nggak mau, itung-itung di bantuin. Kalo nggak gitu juga saya yang sebagai petani juga merasa terdampak waktu akses ke jalan belum ada atau masih susah. Tetapi sekarang akses ke jalan lebih mudah.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik ini memiliki dampak positif dalam pemenuhan dasar kebutuhan. Seperti uang, semua orang membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, pemberian akses untuk mendukung pekerjaan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani juga terdampak karena adanya praktik ini. Kemudahan akses untuk petani dalam melakukan pekerjaannya semakin memperlihatkan jika praktik ini tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga positif. Selain itu,

pemberian lapangan pekerjaan untuk masyarakat seperti pada saat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan juga berpengaruh pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

3. Memperkuat Jaringan Sosial dan Dukungan

Ada delapan ide kunci dalam analisis jaringan sosial, menurut Wasserman dan Faust (1994) (Mona, 2020). Aktor adalah yang pertama. Pemahaman antara entitas sosial dan signifikansi hubungan diperhitungkan dalam analisis jaringan sosial. Entitas sosial mengacu pada pelaku. Individu, bisnis, atau seluruh kelompok sosial semuanya dapat menjadi aktor. Yang kedua adalah hubungan relasional; hubungan sosial mengikat aktor satu sama lain. Ikatan adalah hubungan yang berkembang antara aktor dan dapat diekspresikan dalam berbagai cara. Jenis hubungan ketiga adalah dyad, yang pada dasarnya merupakan ikatan antara dua aktor. Sepasang pemain dan hubungan mereka membentuk dyad. Fokus analisis dyadic adalah pada elemen-elemen terkait yang sering muncul bersama dalam hubungan yang kompleks. Trio, kemitraan di antara kelompok aktor yang lebih luas, adalah yang keempat. Analisis triad digunakan untuk menunjukkan transitivitas atau keseimbangan suatu hubungan.

Pasangan adalah sepasang aktor yang terhubung oleh ikatan; ini adalah subgrup kelima. Karena triad terdiri dari tiga pemain yang terhubung oleh ikatan, setiap kelompok aktor yang memiliki ikatan satu sama lain adalah subgrup aktor. Salah satu aspek analisis jaringan sosial yang dianggap penting adalah studi tentang subgrup. Kelompok berada di urutan keenam; jaringan analitik memperhitungkan lebih dari sekadar himpunan, diadik, triad, dan subgrup. Dalam pengertian yang lebih luas, kekuatan analisis jaringan ditemukan dalam kapasitasnya untuk mensimulasikan interaksi antara pemain sistem. Sistem terdiri dari

hubungan yang lebih atau kurang terikat antara anggota suatu kelompok. Kelompok adalah kumpulan aktor yang hubungannya dapat diukur secara konseptual, eksperimental, atau teoritis. Yang ketujuh adalah relasi, yang merupakan sekelompok hubungan dari jenis tertentu di antara para anggotanya. Suatu hubungan didefinisikan, misalnya, oleh ikatan diplomatik formal yang ditegakkan oleh pasangan negara-negara di seluruh dunia. Dengan kata lain, relasi adalah sekelompok hubungan dari jenis tertentu yang diukur oleh pasangan aktor dari sekumpulan aktor tertentu. Ikatan yang berkembang hanya terjadi pada pasangan aktor. Kedelapan, jaringan sosial dapat didefinisikan setelah aktor, kelompok, dan hubungan telah didefinisikan. Jaringan sosial terbentuk dari kumpulan aktor, hubungan, dan batasan yang didefinisikan oleh aktor terkait. Karakteristik jaringan sosial didefinisikan oleh keberadaan hubungan informasi. Sebaliknya, Newma (2003) mendefinisikan jaringan sosial sebagai kumpulan orang atau kelompok orang yang terlibat atau berhubungan satu sama lain dengan cara tertentu. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang luar biasa di era modern, orang-orang sebenarnya telah menciptakan masyarakat jaringan, yang didefinisikan oleh informasi yang bersifat global dan saling terhubung (Mona, 2020).

Dalam konteks klientalisme yang dilakukan oleh calon kepala desa pada PILKADES tahun 2019, klientalisme yang dilakukan dikatakan dapat memperkuat hubungan sosial antara calon dan pemilih. Calon yang memberikan imbalan dapat membangun hubungan personal dengan masyarakat yang akan mengurangi ketegangan atau konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat Desa Kadirejo karena calon kepala desa terlihat lebih peduli terhadap masalah-masalah yang ada. Berikut keterangan dari Ibu Sidah selaku masyarakat yang terdampak dari praktik klientalisme:

“Waktu itu calon kepala desa datang kerumah saya memberi imbalan seperti uang untuk memperoleh suara dari saya. Tapi selain itu, memberian uang tersebut juga membantu saya dalam mengatasi masalah keuangan mbak.”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik klientalisme dilakukan oleh calon kepala desa tidak hanya memiliki dampak negatif terhadap masyarakat Desa Kadirejo tetapi juga memiliki dampak positif. Bantuan yang diberikan dalam praktik klientalisme dapat dijadikan sebagai ajang untuk memperkuat hubungan sosial antara calon kepala desa dan masyarakat. Dengan melihat kondisi masyarakat yang sebgaiian besar membutuhkan bantuan dalam perekonomian, disini calon kepala desa akan meunjukkan sikap kepeduliannya sehingga dapat menarik simpati dari masyarakat sehingga dapat memperoleh suara dari masyarakat tersebut.

B. Dampak Negatif

1. Merusak Sistem Demokrasi

Bagi banyak negara di seluruh dunia, demokrasi merupakan tanda peradaban modern. Karena globalisasi demokrasi, negara-negara memiliki kewajiban implisit untuk memasukkan istilah "demokrasi" ke dalam sistem politik mereka. Demokrasi adalah sistem politik sekaligus budaya politik suatu negara. Meskipun tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik daripada demokrasi, Wilson Churchill dengan jujur mengakui bahwa demokrasi bukanlah sistem yang ideal. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya demokrasi. Di seluruh dunia, banyak jenis rezim politik menyebut diri mereka sebagai demokrasi, meskipun tindakan dan kata-kata mereka sering kali sangat berbeda satu sama lain. Memang benar bahwa sejarah gagasan demokrasi sangat rumit dan ternoda oleh beberapa pertikaian konseptual (Rosana, 2016).

Menurut pengertian demokrasi, rakyat memegang kendali atas pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, dan rakyat juga memegang kekuasaan, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, dan kewenangan membuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi akan terbentuk berdasarkan keinginan dan kehendak mayoritas sekaligus mempertimbangkan pendapat minoritas.

Pada praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 di Desa Kadirejo memiliki dampak negatif yaitu rusaknya sistem demokrasi. Dimana rakyat yang memiliki wewenang atau keputusan dalam memilih calon, dalam adanya praktik ini menjadikan rakyat tidak dapat bebas dalam menentukan pilihannya. Seperti yang dikatan oleh Ibu Sugiarti sebagai masyarakat Desa Kadirejo:

“Ya kalau ngga milih dia yang ga enak mbak, kita udah dikash imbalan untuk memilih dia. Masak udah dibantu kita ngga bantuin balik.”

Dari keterangan tersebut memperlihatkan bagaimana tekanan yang dialami oleh masyarakat dalam menentukan pilihan. Sehingga masyarakat tidak mempunyai kebebasan memilih karna adanya praktik klientalisme tersebut.

2. Penguasaan Money Politik

Dalam konteks ini, uang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, yang dikenal sebagai "politik uang". Karena orang yang menyediakan uang sudah merasa diuntungkan, keputusan yang diambil sebagai hasil dari politik uang ini sepenuhnya ditentukan oleh kemauan mereka sendiri, bukan oleh cita-cita tentang apakah pilihan itu baik atau tidak. Ada yang mengartikan politik uang sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan

menggunakan imbalan materiil atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan serta tindakan pembagian uang, baik uang pribadi maupun uang partai, untuk mempengaruhi suara pemilih (Supriansyah, 2017).

Dalam praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 sebagian besar calon kepala desa menggunakan uang sebagai ajang untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sehingga dalam hal ini uang dianggap semakin berkuasa dalam mempengaruhi hasil dari pemilihan calon kepala desa tersebut. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat karena pendukung calon yang lebih mampu membayar akan mendominasi, sementara calon yang kurang berduit akan terpinggirkan.

3. Pemicu Konflik dalam Masyarakat

Konflik muncul ketika harapan seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan organisasi berbenturan dengan kenyataan harapan tersebut. Menurut Gibson (1977), hubungan yang saling bergantung dapat menimbulkan konflik selain mendorong kolaborasi. Hal ini terjadi ketika semua bagian organisasi tidak bekerja sama karena memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda (Muspawi, 2014).

Konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya di Dusun Bungas, dipengaruhi oleh praktik klientelisme yang terjadi pada PILKADE DESA 2019. Salah satu penyebab terjadinya kontroversi tersebut adalah karena pemilih tidak mendapatkan kompensasi. Ketimpangan dalam alokasi sumber daya atau bantuan merupakan salah satu dampak utama klientelisme. Calon kepala desa yang menganut sistem klientelisme kerap kali hanya memberikan bantuan atau imbalan kepada organisasi yang mendukungnya. Mereka yang tidak menerima kompensasi merasa tidak senang karena merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil.

Lebih jauh, menurut kubu kandidat, metode ini menyebabkan perpecahan dalam kelompok masyarakat yang terbagi dalam beberapa kubu. Ketegangan sosial dapat meningkat antara pendukung dan penentang kandidat tertentu ketika masyarakat terbagi menjadi dua kelompok atau lebih. Hubungan antar warga dapat memburuk jika kelompok merasa dikucilkan dan tidak diperhatikan oleh kandidat kepala desa yang tidak memberi kompensasi kepada mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa praktik klijentalisme yang terjadi pada waktu PILKADES tahun 2019 memiliki beberapa bentuk praktik yang dilakukan oleh para calon dalam menggait suara dari masyarakat Desa Kadirejo.

1. Uang, Sebagian besar calon yang terpilih menang dengan menggunakan cara money politik atau politik uang. Beberapa hari sebelum pemilihan, calon kepala desa, melalui staf kampanyenya, telah menyumbangkan dana kepada masyarakat dan organisasi-organisasi yang menjadi sasaran khusus, untuk memastikan mereka tidak berakhir di tempat yang salah.
2. Pembangunan Pengembangan Desa Wisata Kadirejo 'Agro Park & Reseach Center bidang Pertanian dan peternakan. Salah satu calon kepala desa menggunakan bentuk praktik tersebut untuk menarik simpati atau suara masyarakat dengan alasan bahwa pengembangan desa wisata bahwa pengembangan pembangunan desa wisata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai hiburan masyarakat desa.
3. Pengadaan Internet Desa hasil kerja sama Dengan Suryanett. Bentuk dari praktik ini memiliki peluang bagi salah satu calon kepala desa yaitu Bapak Riyadi untuk menarik suara dari masyarakat dikarenakan pengadaan internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kadirejo. Hal itu merujuk pada kondisi Desa Kadirejo yang sangat susah untuk mengakses sinyal. Dengan adanya pengadaan internet ini, calon kepala desa atas nama Bapak Riyadi waktu itu mengharapkan bahwa program ini dapat memiliki manfaat untuk seluruh masyarakat Desa Kadirejo dalam memudahkan akses berbagai layanan infromasi dan layanan melalui internet.

4. Peningkatan Infrastruktur Desa (sarpras Desa kadirejo seperti jalan poros, jalan usaha tani serta pembanguna talud dalam rangka mendukung perekonomian Desa Kadirejo). Pembangunan infrastruktur yang dijanjikan oleh calon kepala desa memiliki tujuan dan maksud tertentu. Salah satunya adalah untuk mendukung transportasi dan mobilitas serta meningkatkan daya tarik pemuda dalam bidang pertanian. Jalan-jalan yang sudah terleasaskan ini diharapkan dapat memudahkan akses transportasi terkhusus untuk petani dalam membawa hasil panen dan keperluan tani lainnya. Selain itu, dengan akses infrastruktur dengan lebih baik diharapkan pemuda desa lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pertanian.
5. Pembentukan dan pengembangan Kelompok usaha bersama dalam rangka mendukung kegiatan umkm di Desa. pembentukan kelompok usaha tani dan UMKM sebagai bagian dari praktik klientalisme yang dilakukan oleh calon kepala desa memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan. Dengan adanya kelompok lebih mudah bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan memberikan bantuan atau stimulan bagi usaha masyarakat. Selain itu juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masarakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga melalui usaha bersama sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi.
6. Pengembangan BUMDes Jaya Mandiri. pembangunan BUMDes ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan adanya BUMDes, desa memiliki sumber pendapatan yang tetap dan berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Pendapatan ini kemudian bisa digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan desa dan program-program pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat.

Yang kedua, bahwa dampak yang terjadi karena praktik klientalisme yang dilakukan oleh calon kepala desa waktu PILKADDES 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Peningkatan kesadaran berpolitik Sumber Daya Manusia. Masyarakat mulai mempertimbangkan praktik klientalime yang terjadi selama ini pada PILKADES di Desa Kadirejo, terkhusus tahun 2019. Sehingga dari pertimbangan masyarakat tersebut dalam menilai praktik klientalisme memperlihatkan bahwa pengetahuan berpolitik masyarakat semakin meningkat dengan adanya praktik tersebut.
 - b. Pemberian akses dan bantuan terhadap sumber daya manusia. Pemberian akses untuk mendukung pekerjaan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani juga terdampak karena adanya praktik ini. Kemudahan akses untuk petani dalam melakukan pekerjaannya semakin memperlihatkan jika praktik ini tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga positif. Selain itu, pemberian lapangan pekerjaan untuk masyarakat seperti pada saat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan juga berpengaruh pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
 - c. Memperkuat Jaringan Sosial dan Dukungan. Bantuan yang diberikan dalam praktik klientalisme dapat dijadikan sebagai ajang untuk memperkuat hubungan sosial antara calon kepala desa dan masyarakat.
2. Dampak Negatif
 - a. Merusak Sistem Demokrasi. Rakyat yang memiliki wewenang atau keputusan dalam memilih calon, dalam adanya praktik ini menajadikan rakyat tidak dapat bebas dalam menentukan pilihannya.
 - b. Penguasaan Money Politik. Uang dianggap semakin berkuasa dalam mempengaruhi hasil dari pemilihan calon kepala desa tersebut. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat karena

pendukung calon yang lebih mampu membayar akan mendominasi, sementara calon yang kurang berduit akan terpinggirkan.

- c. Pemicu Konflik dalam Masyarakat. Ketika masyarakat terbelah menjadi dua atau beberapa kelompok, mereka yang mendukung calon tertentu dan mereka yang tidak mendukung calon tersebut dapat menambah ketegangan sosial. Kelompok yang tidak mendapatkan imbalan dari calon kepala desa merasa terpinggirkan dan kurang diperhatikan, yang bisa memperburuk hubungan antar warga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 di Desa Kadirejo, adapun beberapa saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kadirejo agar lebih sadar akan berpolitik yang jujur dan adil. Serta bagi Masyarakat Desa Kadirejo yang sudah mulai mempertimbangkan atau menilai jika praktik klientalisme itu tidak boleh terjadi dalam pemilihan kepala desa agar mau memberikan pengetahuannya kepada masyarakat yang lain akan pentingnya cara berpolitik yang sesuai aturan dan ketentuan negara.
2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber referensi serta dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai praktik klientalisme yang terjadi pada PILKADES tahun 2019 di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

Daftar Pustaka

- Andhika, Lesmana Rian. "Bahaya patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa serentak." *Kajian* 22.3 (2019): 205-220. (Tinjauan Pustaka 1)
- Assidiqi, Farid Luthfi, and Kushandajani Kushandajani. "Pandangan Mohammad Hatta Mengenai Desentralisasi Dan Kritik Terhadap Klientelisme Di Indonesia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.3 (2022): 1331-1341 (Tinjauan Pustaka 2)
- Ardiansyah, Ardiansyah, Hafied Cangara, and Andi Alimuddin Unde. "Kepala Desa dan Kearifan Lokal Studi Tentang Kemampuan Para Calon Kepala Desa dalam Menjalin Komunikasi Sosial dengan Warga Pada Pilkades di Tiga Desa Kabupaten Majene." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2018): 1-6.
- Andhika, Lesmana Rian. "Bahaya patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa serentak." *Kajian* 22.3 (2019): 205-220.
- Asad, Ihwana, et al. "Penyuluhan Dampak Internet Pada Pengembangan Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa." *Ilmu Komputer untuk Masyarakat* 2.1 (2021): 37-40.
- Amzar, Yohanes Vyn, et al. "Inisiasi dan pendampingan jasa pengembangan usaha (JPU) Berbasis kearifan lokal bagi UMKM di Desa Renah Alai Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin." (2019).
- Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13.1 (2016).
- Demokrasi-JURNAL_UNPAR.PDF.
- Dikrurahman, Diky. "Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa dian." *Jurnal Indonesia Sosial*

- Dewi, Septiana Novita, and Aris Tri Haryanto. "Pendampingan Penggunaan Internet Bagi Ibu-Ibu Pkk Di Desa Ngasinan Etan, Gebang, Masaran, Sragen." *Wasana Nyata* 4.1 (2020): 38-42.
- Firmansyah, Deri. "Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1.2 (2022): 85-114
- Firmansyah, Burhanudin. "Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkada Sistem E-Voting Di Desa Ujunggede 2016)." *Journal of Politic and Government Studies* 8.01 (2018): 41-50.
- Fauzi, Salsabila Athaya, and Agus Machfud Fauzi. "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23.1 (2021): 171-179.
- Fajri, Lalu Moh Nazar. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)* 1.1 (2017): 11-22.
- Google. (n.d.). *Democracy for sale*. Google Buku
- Gerald, Galang. "Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali: Studi Relasi Kuasa Patron–Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor-Subandi." *Journal of Politica Governo* 1.2 (2024): 5-19. (Tinajaun Pustaka 9)
- Heywood, A. (2013). *Politics*. Palgrave Macmillan.
- Hanif, H. (n.d.). *Politik klientelisme Baru Dan Dilema Demokratisasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Hidayat, Endik, Daniel Susilo, and Teguh Anggoro. "Strategi Komunikasi Tentara dalam Upaya Membantu Pengamanan Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Komunikasi Profesional* 7.1 (2023): 121-133.
- Huzain, Hasriany. "Pengelolaan sumber daya manusia." (2021).

- Junaidi, Veri. "PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU: MAU DIBAWA KEMANA?." *Pemilu Demokrasi* (2012): 1.
- Jimmy, R. (n.d.). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. (Tinjauan Pustaka 1)
- Kementrian Riset, T. D. P. T. (n.d.). *Garba Rujukan Digital*. Garuda.
- Kurniawan, Rizki Herdi. "PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH PADA PILKADA DI SUMATERA BARAT." *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 32-41. (Tinjauan Pustaka 5)
- Karisma, Erni. *STRATEGI POLITIK CALON KEPALA DESA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE III TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA KEPALA DESA GEDANGAN KECAMATAN NGRAYUN, KABUPATEN PONOROGO)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.
- Mardhika, Juang Gagah, Rina Martini, and Fitriyah Fitriyah. "Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2019." *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 4.1 (2021): 296-305.
- Misra, Fauzan, et al. "Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7.1 (2021): 43-56. (Tinjauan Pustaka 6)
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018).
- Mustofa, Amirul, and Firda Ayu Nur Afifah. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* (2023): 46-62.

- Mona, Nailul. "Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (kasus penyebaran virus corona di Indonesia)." *Jurnal sosial humaniora terapan 2.2* (2020): 12.
- Muspawi, Mohamad. *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)*. Vol. 16. Jambi University, 2014.
- Nuraeni, Yeni. "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal) 3.1* (2018): 42-53.
- Nurussofiah, Febi Fatlika, and Mohammad Arifin. "Pengembangan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Produsen Tape Di Desa Kramatagung Probolinggo." *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2.1* (2023): 9-21.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi 6.1* (2020): 141-152.
- Putra, Gede Ari Pratama, Hertanto Hertanto, and Arizka Warganegara. "Fenomena Relawan Politik dan Potensi Praktik Klientelisme Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung." *Perspektif 11.4* (2022): 1387-1393 (Tinjauan Pustaka 7)
- Pratama, Rekha Adji. "Patronase dan Klientalisme pada pilkada serentak kota Kendari tahun 2017." *Jurnal Wacana Politik 2.1* (2017): 33-45.
- Pambudiyatno, Nyaris, et al. "Pelatihan Jaringan Komputer dan Pembuatan Jaringan Internet Desa." *Journal of Public Transportation Community 3.1* (2023): 11-29.
- Rochman, Noor. "Model pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat." *Jurnal Equilibria Pendidikan 1.1* (2016).
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen 6.2* (2020).

- Rosyan, Adam Nurfaizi, and Eko Prasajo. "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12.1 (2024).
- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.
- Sejati, Veny Ari. "Penelitian Observasi Partisipatif Bentuk Komunikasi Interkultural Pelajar Internasional Embassy English Brighton, United Kingdom." *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 20.1 (2019): 21-24
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Gugule, Hamdi, and Romi Mesra. "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8.3 (2022): 1071-1078.
- Sudarmono, Sudarmono, Rizari Rizari, and Hari Hari. "Artikulasi Kekuasaan Dalam Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Klientelisme di Pesisir Kota Makassar." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 12.1 (2020): 1-16. (Timjauan Pustaka 4)
- Syawawi, Reza. "Memutus Oligarki Dan Klientlisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1 (2021): 139-152. (Tinajuan Pustaka 8)
- Sudarmono, Sudarmono, Rizari Rizari, and Hari Hari. "Artikulasi Kekuasaan Dalam Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Klientelisme di Pesisir Kota Makassar." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 12.1 (2020): 1-16.
- Sofyan, Agus. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8.1 (2021): 1-14.
- Sumarto, M. (2018). *PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KLIENTELISME*. Yogyakarta: UGM PRESS.

- Sofyan, Hamdan Kautsar. *Peran Tokoh Agama Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Utama Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)*. Diss. Universitas Siliwangi, 2021.
- Sofyan, Agus. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8.1 (2021): 1-14.
- Santika, I. Gusti Putu Ngurah Adi. "Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan umur terhadap daya tahan umum (kardiovaskuler) mahasiswa putra semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali tahun 2014." *Jurnal pendidikan kesehatan rekreasi* 1.1 (2015): 42-47.
- Saifulloh, S., Sri Anardani, and Qoirrudin Raga Pratama. "Edukasi penggunaan internet sehat untuk mengenali berita Hoax bagi pemuda Dusun Pepe Desa Pajaran Kab. Madiun." *SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2022): 29-32.
- Sari, Ayu Multika, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid. "Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2.4 (2014): 765-770.
- Supriansyah, Mat. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Uang: Pengertian, Sejarah, Jenis, Fungsi, Dan Manfaatnya*. OCBC. (n.d.).
- Usboko, Ignasius. "INSTITUSIONALISASI DEMOKRASI KONSENSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUN'NOE, KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA." *Jurnal Poros Politik* 1.2 (2019): 26-30.
- Ubaidillah, Ubaidillah, and Rendi Nur Efendi. "Analisis karakter disiplin peserta didik sekolah dasar dalam muatan pembelajaran matematika." *Journal of Basic Education Research* 3.1 (2022): 10-15

- Wawan, W., and Mohamad Iyos Rosyid. "Kepala Desa Perempuan dan Local Strongman: Membunuh Atau Menyuburkan Patriarki di Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak." *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 3.1 (2023): 30-43. (Tinjauan Pustaka 10)
- Wijaya, I. Gede Bayu, et al. "Pengembangan Usaha Kerajinan Ingke Melalui Pelatihan Pemasaran Modern (E-Marketing) dan Pembentukan Kelompok Usaha." *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.2 (2022): 125-130.
- Yanto, Ardi. "Fenomena Dan Indikasi Patronase Dan Klientelisme Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020." *Jurnal Governance dan Administrasi Publik* 6.2 (2022): 57-64.

Lampiran



Wawancara Kepala Desa Bapak Riyadi



Wawancara Masyarakat Pak Priyono



Wawancara Masyarakat Bu Sidah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Selma Vicky Marshanandan
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 23 Mei 2001
Nama ayah : Timbul Wiyono
Nama Ibu : Sri Sugiyarti
Alamat : Dusun Bungas Rt 14/Rw 005 Desa Kadirejo Kecamatan
Pabelan Kab. Semarang.
No. Hp : 085603498564
Alamat Email : selmavicky23@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Aisyiyah Salatiga | : 2007-2008 |
| 2. SD N kalicacing Salatiga | : 2008-2014 |
| 3. SMP Muhammadiyah Salatiga | : 2014-2017 |
| 4. SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga | : 2017-2020 |

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Fisip Tahun 2020

Semarang, 9 Desember 2024

Hormat Saya,

Selma Vicky Marshananda

(2006016096)